



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**PERAN PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK DALAM
MENINGKATKAN CITRA KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

T E S I S

DISUSUN OLEH :

AFRIZAL HENDRA

1 2013 0101 001

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

N a m a : Afrizal Hendra
N P M : 1 2013 0101 001
Program Studi : Strategi Peran Semesta
Judul Tesis : **“PERAN PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK
DALAM MENINGKATKAN CITRA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK
INDONESIA”**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister bidang Pertahanan pada Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

1. Marsda TNI DR. U.H. Harahap, M.Si
Pembimbing I (.....)
2. DR. Herlina Saragih, M.Si
Pembimbing II (.....)
3. Prof. DR. Setyo Harnowo, Drg,Sp.BM (K),
FICD, FICCDE /Penguji I (.....)
4. Brigjen TNI Herman, M.Si (Han)
Penguji II (.....)
5. DR. Poppy Setiawati, S.Sos., M.Si
Penguji III (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : September 2014

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Jakarta, September 2014

Afrizal Hendra

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Afrizal Hendra
N P M : 1 2013 0101 001
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalty Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERAN PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN CITRA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Beserta perangkat yang **ada** (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik serta sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, September 2014

Afrizal Hendra

ABSTRAK

Nama : AFRIZAL HENDRA
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul : Peran Puskom Publik dalam Meningkatkan Citra
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Pusat Komunikasi Publik serta mengidentifikasi faktor apa saja yang dihadapi oleh Pusat Komunikasi Publik dalam meningkatkan citra Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Pusat Komunikasi Publik Kemhan beserta awak media massa. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*).

Hasil penelitian ini adalah bahwa Puskom Publik berperan penting dalam meningkatkan citra Kemhan. Hal ini bisa dilihat dari tugas Puskom publik selaku pelaksana birokrasi yang memberikan informasi pertahanan dengan menjalankan empat fungsi yaitu pertama, melaksanakan tugas administrative dengan baik yaitu terlihat dari pelaksanaan program dan kebijakan sudah mengikuti aturan yang ada. Sebagian besar pegawai sudah memahami bagaimana standar pembuatan kebijakan yang ada. Kedua, sebagai pemberi nasihat kebijakan, Puskom publik sebagai lembaga yang menghimpun informasi kemudian disampaikan dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Ketiga, pelaksanaan tugas artikulasi dan agregasi kepentingan terlihat dari terlibatnya media massa sebagai penghubung antara Kemhan dan masyarakat. Keempat, yaitu ikut menjaga stabilitas politik, dapat dilihat dari tersampainya informasi pertahanan kepada masyarakat. Faktor pendukung yaitu dengan pembentukan tim IBO (*Image Building Operation*) yang terdiri dari anggota Puskom Publik yang diberi tugas untuk membuat opini positif berupa tulisan atau artikel yang *diupload* ke media massa serta memberi komentar positif apabila ada berita tentang Kemhan/TNI yang beredar di media massa serta membina hubungan baik dengan lembaga humas di luar Kemhan, rekan-rekan media dan jaringannya. Faktor penghambat adalah kurangnya pegawai yang kompeten, komposisi pegawai yang tidak seimbang, baik kualitas maupun kuantitas.

Saran dalam penelitian ini adalah melaksanakan sistem rekrutmen secara benar sesuai dengan pendidikan dan kompetensi, memberikan pelatihan sesuai dengan tuntutan pekerjaan, menerbitkan harian sendiri, dan membina hubungan baik dengan media dengan cara mengintensifkan pertemuan rutin secara berkala, maupun melaksanakan press tour sehingga terjalin komunikasi yang baik dan dapat membentuk opini positif tentang Kemhan.

Kata Kunci : Peran, citra, komunikasi, publik, pertahanan, Puskom publik

ABSTRACT

Name : Afrizal Hendra
Study program : Total War Strategy
Title : The Role of Public Communication Center in
Improving Image of Ministry of Defense of the
Republic of Indonesia

This Research aims to analyze how the role of Public Communication Center and identify what factors faced by the Center for Public Communication in improving the image of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia.

The methodology used in this research is descriptive qualitative. Techniques of collecting data using interviews, observation and documentation. The unit of analysis in this study were all employees of Public Communication Center of Ministry of Defense along with the journalists of media. This study uses a purposive sampling technique.

The result of this research is that the Public communication Center has important role in improving the image of the Ministry of Defense. This can be seen from Job description as Bureaucracy that have four functions that are, Firstly, carrying out administrative duties that can be seen from the implementation of programs and policies. Most of the employees have understood how to do policy-making standards. Secondly, as a policy adviser, public Communication Center as an institution that collects information and then presented as suggestion in policy making. Thirdly, implementation of articulation and aggregation of interests can be seen in involvement of the mass media as a liaison between the Ministry of Defense and public. Fourthly, keeping politic stability, can be seen from any information is delivered to public by Ministry of defense directly. Supporting factors is establish of IBO teams (Image Building Operation) which consists of members of the Public Communication Center are given the task to make a positive opinion in articles that are uploaded to the mass media as well as positive comments when there is news about the Ministry of Defense / Military in media and maintaining good relationships with Public Relation agencies beyond the Ministry of Defense, media colleagues and networks. Weak factor is the lack of competent personnel, imbalance of personnel composition, not only quality but also quantity.

Suggestions in this study is conducting recruitment base on competency, more training and development to improve professionalism, having our own newspaper, building a good relationship with media with routine meeting, conducting press tour to build a positive opinion about the Ministry of Defense.

Keywords: Role, image, communications, public, defense.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tesis yang mengambil judul “PERAN PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK KEMHAN DALAM MENINGKATKAN CITRA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dan tugas yang harus diselesaikan untuk menamatkan studi dan memperoleh gelar Magister Sains (Pertahanan) pada fakultas strategi pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.

Adapun materi peran Pusat komunikasi publik Kemhan dalam meningkatkan citra kementerian pertahanan republik Indonesia ini dipilih karena pada era reformasi seperti sekarang ini, peran Humas sangat penting dan strategis dalam membangun citra dan pemberian informasi kepada masyarakat. Puskompublik sebagai lembaga humas kementerian pertahanan harus meningkatkan peran tersebut agar tugas kementerian pertahanan dapat tersosialisasikan secara tepat, cepat dan benar kepada masyarakat sebagai penerima informasi, sehingga masyarakat dapat melihat dan mengetahui tugas pokok dan fungsi kementerian pertahanan secara utuh dan benar. Apabila tugas dan fungsi tersebut tidak diketahui, dipahami dengan benar oleh masyarakat, maka pada akhirnya dapat mengakibatkan terganggunya sistem pertahanan nasional.

Saya menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang saya miliki, menjadikan karya tulis ini sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saya berusaha untuk selalu terbuka terhadap kritik dan masukan yang sifatnya membangun demi terwujudnya karya tulis yang lebih baik. Oleh sebab itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah membantu baik moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini, antara lain :

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas strategi perang semesta universitas pertahanan Indonesia, staf pengajar (dosen) dan staf administrasi yang selalu memfasilitasi dan siap membantu dalam mengikuti kegiatan belajar di Fakultas Strategi Pertahanan Unhan.
2. Bapak Marsekal Muda TNI DR. U.H. Harahap, MSi selaku Dosen pembimbing I yang selalu memberikan motivasi, petunjuk, masukan dan saran demi tersusunnya tesis ini.
3. Bapak Brigadir Jenderal TNI Sisriadi selaku Kapuskompublik Kementerian pertahanan RI yang bersedia menjadi narasumber kami dan selalu membimbing serta memberikan petunjuk untuk Puskompublik yang lebih baik di masa datang.
4. Ibu DR. Herlina Saragih, MSi selaku pembimbing II yang tanpa lelah dan kesabaran yang penuh dan tulus dalam membimbing saya demi selesainya tesis ini.
5. Teman-teman sejawat mahasiswa dalam program studi strategi perang semesta yang selalu kompak dan saling membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Secara khusus adalah penghargaan dan terima kasih saya yang tidak pernah habis untuk kedua orang tua saya, ayahanda H. ZAHARI HS dan ibunda (Alm) Hj. ZALINA yang telah mengajarkan arti mencintai, menghargai dan saling berbagi, serta membuat saya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penghargaan dan terima kasih ini juga tak lupa saya persembahkan kepada isteri saya terkasih Dra. Hj. Marlindawaty yang telah rela berkorban, tak pernah mengeluh dalam mendukung dan membantu, yang telah memberikan saya sepasang putera puteri, hingga saya bisa menyelesaikan kegiatan belajar ini dengan baik.

Tak lupa pula untuk kedua anak-anakku yaitu Ahmad Wira Okta Mahendra dan Amanda Rasulia Gita Mahendrasti yang selalu memberi support atas usaha keras ayahnya dalam menuntut ilmu, semoga dengan tesis ini dapat lebih membuka mata dan pengharapan akan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan.

Yang terakhir adalah harapan saya semoga tesis ini berguna bagi pembaca, Pusat komunikasi publik dan kementerian pertahanan RI, dan mudah-mudahan pula bisa membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan akademisi. Buat almamater tercinta yang saya banggakan: Teruslah meningkatkan mutu, berjuang dalam persaingan yang sehat untuk mewujudkan dunia pendidikan yang lebih baik.

Jakarta, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Disain Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.2 Komunikasi	10
2.2.1 Pengertian Komunikasi.....	11
2.2.2 Pengertian Politik	12
2.2.3 Komunikasi Politik	13
2.2.4 Elemen Utama Komunikasi Politik.....	14
2.2.5 Komunikasi Publik	15
2.3 Peran	16
2.4 Pencitraan	17
2.5 Hubungan Masyarakat (<i>Public Relation</i>).....	19
2.6 Media Massa.....	21
2.7 Fungsi Pertahanan Negara	24
2.8 Kerangka Berpikir.....	26
2.9 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	27
2.9.1 Penelitian Lubis.....	27
2.9.2 Penelitian Rizlani.....	29
2.9.3 Penelitian Fathurohim Widodo Muktiyo	31
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Pendekatan Penelitian.	33
3.2 Tehnik Pengumpulan Data.....	34
3.2.1 Wawancara.....	34

3.2.2	Obserrvasi.....	34
3.2.3	Dokumenter.....	34
3.3	Unit Analisis dan <i>Key Informan</i>	35
3.4	Teknik Penarikan <i>Key Informan</i>	35
3.5.	Teknik Analisis Data	35
3.6	Definisi Konsep	37
3.7	Definisi Operasional.....	38
BAB 4	ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	40
4.1	Gambaran Umum Obyek penelitian	40
4.1.1	Sejarah Singkat Kemhan RI	40
4.1.2	Peran Strategis Kementerian Pertahanan	45
4.2	Pusat Komunikasi Publik	46
4.2.1	Tugas Puskompublik.....	46
4.2.2	Fungsi Puskompublik..	46
4.2.3	Susunan Organisasi Puskompublik.....	47
4.2.4	Sumber daya manusia	50
4.2.5	sarana dan Prasarana.....	52
4.2.6	Landasan Hukum	53
4.3	Pembahasan Hasil penelitian	53
4.3.1	Peran Puskom dalam Meningkatkan citra Kemhan	54
4.3.1.1	Tugas Administratif	54
4.3.1.2	Memberi Nasihat Kebijakan	58
4.3.1.3	Tugas Artikulasi dan agregasi Kepentingan	60
4.3.1.4	Tugas menjaga Stabilitas Politik	64
4.3.2	Faktor-faktor yang dihadapi oleh Puskompublik	68
4.3.2.1	Faktor Pendukung	68
4.3.2.2	Faktor Penghambat	69
4.3.2.3	Solusi	70
4.3.3	Relevansi Teori dengan Temuan Penelitian	71
BAB 5	PENUTUP	76
5.1	Simpulan	76
5.2	Saran	76
5.2.1	Saran Teoretis.....	78
5.2.2	Saran Praktis.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN.....		80
1.	Pedoman Wawancara.....	82
2.	Ringkasan hasil Wawancara	86
3.	Daftar Informan.....	110
4.	Daftar Inventaris Puskompublik	111

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media massa memiliki peran besar dalam perkembangan atau bahkan dalam perubahan pola tingkah laku dari suatu masyarakat. Adanya media massa, masyarakat yang tadinya dapat dikatakan tidak beradab dapat menjadi masyarakat yang beradab. Hal itu disebabkan karena media massa mempunyai jArgan yang luas dan bersifat massal sehingga masyarakat yang membaca tidak hanya orang perorang tapi sudah mencakup jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan pembaca, sehingga pengaruh media massa akan terlihat di permukaan masyarakat. Peran media massa kian penting karena media memiliki kemampuan komunikasi dengan banyak orang dengan latar belakang sosial yang berbeda. Melalui media massa, pemerintah dapat menjangkau khalayak luas dalam waktu serempak serta terus menerus. Bisa dikatakan bahwa antara pemerintah dan media massa memiliki saling ketergantungan yang sangat kuat.

Media massa, publik, pemerintah diletakkan dalam suatu rangkaian kesatuan yang tak dapat terpisahkan satu sama lain, bagi suatu perkembangan yang bebas dan bertanggung jawab, yang konstruktif dan *adequate* dalam alam demokrasi. Keterlibatan media memang bisa membantu dalam membingkai (*frame*) isu-isu yang berhubungan dengan korupsi dan pelayanan publik yang berkaitan erat dengan kepentingan warga masyarakat. Sektor media independen yang terampil dan hidup juga dipandang merupakan sarana yang paling menjanjikan bagi masyarakat untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan warga masyarakat untuk mendorong dan menjamin reformasi pemerintahan dan pengentasan kemiskinan.

Media sebagai salah satu sektor yang penting bagi terciptanya *good governance*, suatu tatanan pengelolaan kenegaraan dan kemasyarakatan yang baik, dimana sektor-sektor yang terlibat didalamnya saling terkait,

saling membutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, yakni, masyarakat yang bercirikan telah menjalankan prinsip-prinsip transparansi kebijakan, kesetaraan pelayanan publik, dan partisipasi publik yang baik. Sektor-sektor yang saling terkait dan saling membutuhkan itu adalah media, masyarakat, pemerintah, dan swasta.

Terkait dengan sistem pertahanan Indonesia, pemerintah dan media massa harus bekerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Media massa sebagai bagian dari rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pemberitaan yang benar, akurat dan berimbang kepada masyarakat. Luasnya wilayah Indonesia, tingginya jumlah penduduk ditambah kultur yang majemuk membuat Negara ini menjadi rawan konflik. Pemberitaan yang keliru di media massa akan lebih mudah memicu konflik baik secara vertikal maupun horizontal.

Kementerian Pertahanan sebagai representasi pemerintah dalam bidang pertahanan memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis serta berperan penting dalam menjaga keamanan Negara dan keselamatan bangsa, serta kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Kemhan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seperti tersebut di atas, Kemhan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;

2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan.
 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan;
 4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
- Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, Kementerian

Pertahanan terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1. Sekretariat Jenderal
2. Staf Ahli Menteri
3. Inspektorat Jenderal
4. Universitas Pertahanan
5. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
6. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan
7. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
8. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
9. Badan Sarana Pertahanan
10. Badan Penelitian dan Pengembangan.
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan
12. Pusat data dan informasi
13. Pusat Keuangan
14. Pusat Komunikasi Publik
15. Pusat Rehabilitasi Cacat

Bagian penting dari Kemhan salah satunya adalah Pusat Komunikasi Publik. Sub organisasi yang berfungsi sebagai Humas (*Public Relation*) ini merupakan bagian yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui media massa. Komunikasi yang baik antara Puskom Publik dengan media massa diharapkan menghasilkan suatu sinergitas tersendiri dalam penyampaian pemberitaan yang akurat dan berimbang sebagai upaya sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang pertahanan kepada masyarakat. Dari sudut edukasi, media massa juga diharapkan dapat mendidik masyarakat agar lebih memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi informasi di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan akses memperoleh berita semakin mudah menuntut Puskom Publik untuk banyak berbenah diri.

Humas yang dibentuk di lembaga pemerintah diantaranya sebagai juru bicara pemerintah, melakukan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah, melakukan hubungan intern dengan satuan dan unit kerja di lingkungan pemerintah, melaksanakan usaha untuk peningkatan peliputan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan melaksanakan koordinasi/kerja sama dengan organisasi kewartawanan (*Moore dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012:53*). Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengelola seluruh media massa sebagai alat untuk menciptakan suasana kondusif, sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Berita yang ditampilkan jangan selalu memojokkan pemerintahan yang berkuasa dan cenderung sekadar menjatuhkan, tetapi seharusnya menjadi sarana kritik yang konstruktif dan objektif.

Perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses berbagai informasi dari media masa. Aneka informasi yang belum tentu didukung fakta yang benar dapat dengan mudah menyebar ke masyarakat luas dimana informasi tersebut dapat mempengaruhi dan membangun opini masyarakat. Beberapa media kurang memahami dan/atau karena kesengajaan sesuai agenda setting, sering memuat berita tentang Kemhan/TNI secara tidak proporsional dan professional sehingga berdampak tidak menguntungkan bagi pembangunan citra positif Kemhan/TNI. Terdapat kecenderungan pemberitaan yang tidak proporsional tersebut banyak dilandasi oleh motif tertentu. Namun, secara umum lebih banyak pemberitaan tentang Kemhan/TNI yang masih proporsional.

Beberapa media massa nasional yang kerap memberitakan tentang situasi pertahanan dan keamanan Negara antara lain Pelita, Kompas,

Republika, Rakyat Merdeka, Seputar Indonesia, Suara Karya, Sinar Harapan, Jurnal Nasional dan lain-lain. Pemberitaan-pemberitaan tersebut oleh Puskompublik senantiasa dianalisis dan dievaluasi menjadi masukan yang berarti dalam membuat kebijakan bidang pertahanan.

Pada tahun 2013 kasus yang banyak menuai pemberitaan negatif antara lain kasus cebongan yang melibatkan unsur TNI sendiri. Kasus lainnya adalah tentang masalah terorisme. Permasalahan lainnya antara lain tentang Kemhan/TNI, Alutsista, Hubungan Indonesia-Australia, Kerjasama Pertahanan, Hubungan Indonesia-Singapura, masalah perbatasan, masalah Papua, Intelijen, dan lain-lain diberitakan secara berimbang oleh media cetak. Kendati demikian, Puskompublik harus tetap selalu memonitoring pemberitaan-pemberitaan tersebut agar tidak keluar jalur.

Salah satu pemberitaan terbaru, sebagai contoh, yang terkesan menyudutkan pemerintah antara lain adalah masalah kasus penyadapan oleh Amerika dan Australia terhadap beberapa pejabat di Indonesia. Dalam salah satu pemberitaan melalui media massa, Harsoyo mengemukakan bahwa Pemerintahan Indonesia tidak melihat persoalan perang *cyber* menjadi persoalan yang strategis. Padahal, ke depannya perang bukan semata-mata perang adu senjata, melainkan perang *cyber* (www.tribunnews.com, diakses 26 februari 2014). Kasus penyadapan yang dilakukan pihak Amerika dan Australia membuktikan lemahnya sistem keamanan nasional Indonesia di bidang teknologi.

Berita tersebut tentu saja sangat merugikan karena bisa membuat citra Kemhan turun di mata masyarakat. Puskompublik sebagai bagian dari Kemhan yang memiliki tugas untuk menyampaikan informasi yang benar-benar akurat kepada masyarakat dan melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan yang dianggap tidak berimbang dianggap belum berperan secara optimal dalam meningkatkan pencitraan Kemhan. Kendati demikian, tidak semua permasalahan pemberitaan tersebut juga terletak pada ketidak mampuan Puskompublik didalam melaksanakan tugasnya, walaupun Tupoksi sudah dilaksanakan dengan baik, namun apabila media tidak melaksanakan fungsinya secara proporsional,

informasi yang akan disampaikan Puskom publik kepada masyarakat selaku penerima informasi juga tidak bisa tersampaikan. Permasalahan tersebut antara lain karena media dikuasai oleh pemilik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan agenda nya masing-masing, baik partai maupun kelompok-kelompok kepentingan. Hal tersebut dapat dilihat pada Metro TV dan TV One yang selalu bertolak belakang dalam menyajikan pemberitaan terutama didalam kegiatan kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu yang menunjukkan perbedaan kepentingan para pemilik mediana. Saat ini belum ada media yang benar-benar berpihak terhadap kebijakan Kemhan. TVRI dan RRI yang statusnya adalah media milik pemerintah juga belum sepenuhnya menyajikan pemberitaan yang selalu berpihak kepada Kemhan. Kondisi demikian menuntut Puskom Publik untuk membina hubungan baik dengan media, minimal media massa milik pemerintah. Tanpa adanya hubungan baik ini maka akan sulit juga untuk membina opini positif masyarakat tentang Kemhan.

Paparan di atas menggugah penulis untuk melakukan penelitian tentang Peran Puskom Publik Dalam Meningkatkan Citra Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Puskom Publik Kemhan RI belum berperan optimal di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga belum dapat meningkatkan citra kementerian pertahanan. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana peran Pusat Komunikasi Publik dalam meningkatkan citra Kementerian Pertahanan Republik Indonesia?

1.2.2 Faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh Pusat Komunikasi Publik dalam meningkatkan citra Kementerian pertahanan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk menganalisis bagaimana peran Pusat Komunikasi Publik dalam meningkatkan citra Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

1.3.2 Mengidentifikasi faktor apa saja yang dihadapi oleh Pusat Komunikasi Publik dalam meningkatkan citra Kementerian pertahanan Republik Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1.4.1 Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan bagi kajian Strategi Perang Semesta melalui teori Komunikasi khususnya komunikasi publik

1.4.2 Manfaat secara praktis yaitu memberikan masukan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia khususnya Pusat Komunikasi Publik dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan citra lembaga melalui pemberitaan media massa.

1.5. Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada peran Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan dalam meningkatkan citra kementerian pertahanan Republik Indonesia. Sebagai satuan yang melaksanakan fungsi kehumasan dan membina hubungan dengan media serta sebagai juru bicara kementerian dalam menyampaikan informasi. Penelitian ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab 1 adalah bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang permasalahan di Puskom Publik untuk diteliti, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penulisan serta gambaran desain penelitian .

Bab 2 membahas tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka pemikiran dan beberapa pengertian tentang komunikasi, politik, komunikasi politik, teori peran, pencitraan, kehumasan dan media massa serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Bab 3 membahas tentang metode penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data terdiri atas penentuan sumber data, berupa wawancara, observasi maupun menggunakan data historis (*documenter*).

Bab 4 menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya, yang dikaji dan dianalisa dari persoalan pokok penelitian yaitu peran pusat komunikasi publik dalam meningkatkan citra kementerian pertahanan.

Bab 5 yaitu Kesimpulan dan Saran, yang berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah sebagai temuan penelitian dan telah dibuktikan kebenarannya secara teoritis. Temuan ini juga akan menjadi dasar dalam menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Adapun gambaran penelitian dalam tesis ini dapat disampaikan bahwa pendekatan dan jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi di Kantor Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan dan beberapa media di Jakarta.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Birokrasi terjadi pada dasarnya berawal dari suatu masyarakat yang eksis dan hidup dengan memiliki norma dan tradisi tersendiri yang secara spesifik berbeda dengan norma dan tradisi masyarakat lain. Norma dan tradisi ini mengatur tata kehidupan masyarakat sehari-hari tanpa tertulis, tetapi dihormati, dilaksanakan, dan dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat. Norma dan tradisi ini lahir dari hasil kesepakatan anggota komunitas atas dasar pengalaman mereka hidup bersama.

Norma dan tradisi yang telah melembaga akhirnya disepakati bersama menjadi tata aturan main (*rule of the game*) yang mendasari pranata sosial yang menjadi panduan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Atas dasar konstitusi inilah suatu Negara lahir, beserta segala perangkat dan kelengkapan Negara yang disesuaikan dengan amanat konstitusi itu.

Dalam sebuah Negara yang modern, pemimpin melalui para pejabat politik yang dipilih rakyat melalui pemilu. Para pejabat politik inilah yang membuat keputusan-keputusan dan kebijakan pokok dalam mengatur kehidupan bernegara. Tahap selanjutnya adalah membentuk birokrasi sebagai organ (institusi) Negara yang mengorganisasi pelaksana penyelenggaraan Negara, bertugas mewujudkan cita-cita luhur masyarakat Negara itu, serta menjaga dan kelangsungan Negara. Lembaga birokrasi terdiri dari para pejabat (*officials*) yang menjalankan tugas. Kemhan sebagai bagian dari birokrasi Indonesia memiliki tugas melaksanakan kebijakan bidang pertahanan dan keamanan.

Eksistensi birokrasi merupakan organ utama dalam sistem dan kegiatan pemerintahan yang karenanya birokrasi dapat menjalankan peran-peran tertentu atas nama otoritas Negara—satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh badan/institusi lain mana pun.

Sungguh pun tugas birokrasi itu sedemikian banyak dan kompleks, tetapi hal itu dapat dikategorisasikan dalam beberapa tugas pokok. Menurut Heywood (dalam Setiyono, 2012:38-43), tugas dan peranan birokrasi dalam suatu Negara mencakup empat fungsi utama, yaitu :

1. Melaksanakan tugas administratif (*carrying out administration*).
2. Memberikan masukan dan nasihat dalam pembuatan kebijakan (*offering policy advice*).
3. Melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan (*articulating and aggregating interests*), dan
4. Menjaga stabilitas politik (*maintaining political stability*).

Kemhan memiliki beberapa sub bagian yang masing-masing memiliki tugas, pokok dan fungsinya sendiri. Salah satunya adalah Puskompublik. Dalam konteks kehidupan bernegara, Puskom Publik sebagai bagian dari sebuah lembaga Negara yang memiliki peran strategis dalam membina hubungan baik dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui media massa.

Esensi tujuan humas di dunia pemerintahan adalah membuat berbagai program pemerintah yang dapat membentuk, meningkatkan dan memelihara citra positif dan reputasi baik agar dapat memperoleh opini publik yang menguntungkan, serta dukungan dan simpati rakyat atau publik. Citra sengaja diciptakan Humas dalam dunia pemerintahan dalam bentuk *events* (kegiatan-kegiatan), kampanye dan program-program (Ardianto, 2011).

Dengan pelaksanaan peran humas pemerintah, tujuan akhirnya adalah untuk membantu citra yang positif tentang pemerintah di mata masyarakatnya. Citra mencerminkan apa yang dipikirkan, emosi dan persepsi individu. Walaupun orang melihat hal yang sama, tapi pandangan mereka bisa berbeda. Persepsi inilah yang membentuk citra dari sebuah organisasi (Alifahmi, 2005).

2.1 Komunikasi

Berikut akan dipaparkan tentang pengertian komunikasi, politik, dan komunikasi politik.

2.2.1 Pengertian Komunikasi

Definisi komunikasi sangatlah beragam. Jika ditelusuri dari asal katanya (etimologi), kata komunikasi berasal dari kata *communis* yang berarti “milik bersama”. Kata ini dapat juga bermakna “berlaku di mana-mana”(Junaedi,2013).

Ada tantangan dalam mendefinisikan kata “komunikasi” karena berbagai definisi yang muncul. Katherine Miller mencatat tantangan dalam pendefinisian kata komunikasi dalam pernyataan sebagai berikut, “konseptualisasi komunikasi telah mengalami perubahan secara substansial selama bertahun-tahun” (dalam Turner dan West, 2007 : 4).

Menurut Turner dan West lagi, keberagaman pengertian komunikasi ini, membawa keunikan dalam kajian komunikasi. Para ahli cenderung melihat fenomena manusiawi dari perspektif yang mereka anut termasuk juga fenomena komunikasi sehingga semakin banyak keberagaman pengertian komunikasi.

Komunikasi sesuai fungsinya terhadap masyarakat mempunyai peran sebagai informasi (*Public Information*), sebagai pendidikan (*Public Education*), mempengaruhi masyarakat (*Public Influence/persuasion*) dan komunikasi sebagai hiburan masyarakat/ *Public Entertainment* (Effendy, 1986).

Namun, ada dua hal yang menjadi benang merah yang menyatukan keberagaman perspektif tentang pengertian komunikasi, di mana keseluruhan pandangan dari berbagai perspektif selalu melihat komunikasi sebagai proses tatap muka serta proses komunikasi bermedia. Dengan menggunakan dua hal ini maka ada beberapa kata kunci dalam komunikasi yang memayungi berbagai perspektif yang ada, yaitu social, proses, simbol, makna, dan lingkungan.

Dari lima kata kunci ini, maka kita dapat mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses social di mana individu-individu menggunakan symbol untuk menafsirkan makna dalam lingkungan mereka.

2.2.2 Pengertian Politik

Politik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Di Indonesia dikenal pepatah *gemah ripah loh jinawi* yang berarti kehidupan yang serba berkecukupan dalam berbagai hal. Kearifan lokal bangsa Indonesia ini sepadan dengan apa yang dikemukakan oleh para filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles yang menyebut *en dam onia* yang berarti *the good life* (Budiardjo 2010 : 13).

Untuk melihat secara lebih komprehensif tentang politik, kita bisa membuka pengertian politik yang dilihat dari perspektif konflik dan konsensus. *Pertama* adalah pengertian politik yang dikemukakan oleh Rod Hague yang menyatakan bahwa politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di anggota-anggotanya (*politics is the activity by which group reach binding collective decision through attempting differences among their members*) (Junaedi, 2013:23). Pengertian ini secara jelas menyebutkan bahwa politik adalah menyangkut cara berbagai kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif, yang berimplikasi tentang pentingnya komunikasi dalam rangka untuk mencapai keputusan.

Dalam politik, sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian ini, berbagai kelompok berusaha membuat keputusan secara kolektif, dimana dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif ini tentu saja melibatkan proses komunikasi. Tanpa ada komunikasi, kelompok-kelompok yang ada tidak akan mampu membuat keputusan secara kolektif. *Kedua*, menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari konflik dan kerja sama (*politics is the activity through which people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*) (Heywood dalam Budiardjo, 2010: 16).

Pengertian ini mengindikasikan bahwa dalam politik terjadi proses komunikasi sebagai bagian dari bentuk kegiatan bangsa untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan yang mengatur kehidupannya. Kata “konflik” dan “kerja sama” semakin memperlihatkan tentang pentingnya komunikasi dalam kegiatan politik, karena konflik dan kerja sama selalu identik dengan kegiatan komunikasi.

2.2.3 Komunikasi Politik

Setelah menelaah tentang pengertian komunikasi dan politik serta level komunikasi, maka selanjutnya komunikasi politik dapat diartikan sebagai berikut. Komunikasi politik bisa dipahami sebagai diskusi politik tentang alokasi sumber daya publik dan otoritas resmi (siapa yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan hukum, legislatif dan pemerintahan) serta sanksi resmi (siapa yang diberi penghargaan atau hukuman oleh negara) (Denton dan Woodward dalam Junaedi, 2013: 24). Sedangkan menurut Grabber, komunikasi politik didefinisikan sebagai bahasa politik yang bukan hanya mengkompromikan retorika semata-mata namun juga tanda-tanda *paralinguistic* seperti gerak tubuh dan tindakan politik seperti boikot dan protes (dalam McNair, 1999 : 4).

Pengertian komunikasi politik yang lain dikemukakan oleh Lord Windlehan yang menyatakan bahwa komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik dari pengirim ke penerima dengan penekanan pada membuat penerima menerima apa yang disampaikan oleh pengirim dan menolak yang berasal dari pihak lain (dalam Subiakto dan Ida, 2012: 19).

Pengertian lain dari komunikasi politik dikemukakan oleh Dan Nimmo yang menyebutkan bahwa komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang berhubungan dengan politik dengan menyajikan konsekuensi actual dan potensial yang mengatur manusia di bawah kondisi konflik (dalam Subiakto dan Ida, 2012:19). Pengertian komunikasi politik yang dikemukakan oleh Dan Nimmo ini bisa memperjelas kepada kita bagaimana sebenarnya komunikasi politik terjadi. Dan Nimmo dalam

pengertiannya tentang komunikasi politik mengemukakan tentang potensial actual dan potensial dalam komunikasi politik. Konsekuensi actual berarti kegiatan yang benar-benar dilakukan oleh para aktor politik, atau kegiatan komunikasi politik yang memang secara jelas berada dalam ranah komunikasi politik, seperti kegiatan kampanye, pidato presiden, iklan partai politik dan sebagainya.

2.2.4 Elemen Utama Komunikasi Politik

Secara garis besar ada tiga elemen besar dalam komunikasi politik, yaitu organisasi politik, media, dan warga Negara. Organisasi politik seringkali disebut sebagai aktor politik. Aktor politik sendiri didefinisikan sebagai individu-individu yang menyalurkan aspirasinya melalui perangkat organisasi dan lembaga, untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Individu ini bisa jadi terlibat dalam proses ini dengan berusaha mendapatkan kekuasaan dalam lembaga politik resmi, seperti melalui pemerintahan maupun lembaga legislatif dimana melalui lembaga seperti inilah kebijakan diterapkan (McNair, 1999: 5). Organisasi politik ini meliputi partai politik, organisasi publik kelompok penekan dan kelompok teroris.

Media massa adalah elemen penting dalam proses komunikasi politik, karena tanpa media massa pesan politik tidak mampu menjangkau khalayak luas dalam waktu yang cepat dan sekaligus massif. Melalui media massa, aktor politik dapat menyampaikan pesan-pesan politik yang ditransmisikan oleh media massa pada khalayak luas. Media massa dalam komunikasi politik bahkan bukan hanya berperan sebagai penyampai (*transmitter*) dari pesan-pesan politik yang dilakukan oleh aktor politik pada khalayak, namun media massa juga berperan sebagai aktor politik dalam proses politik sebagaimana aktor-aktor politik lainnya.

Dalam sistem politik yang demokrasi, fungsi media adalah sebagai saluran komunikasi politik yang awalnya berasal dari luar media itu sendiri dan sekaligus juga sebagai pengirim dari pesan-pesan politik yang dikonstruksi oleh jurnalis (McNair, 1999: 11). Adapun, warga negara dalam konteks komunikasi tentu adalah khalayak (*audience*) yang menjadi

target sasaran dan tujuan dari berbagai kegiatan politik, karena bagaimanapun cara dan apapun bentuknya, aktivitas komunikasi politik diorientasikan untuk mempengaruhi khalayak. Tanpa ada khalayak, semua proses komunikasi pasti akan mubazir.

2.2.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Namun dalam bagian ini yang akan dibahas hanyalah tatap muka di antara organisasi dan lingkungan eksternalnya. Brooks menguraikan tipe komunikasi publik ini sebagai *monological* karena hanya seorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada public (dalam Muhammad, 2008).

Menurut Muhammad (2008), Kualitas yang membedakan komunikasi organisasi publik ini dengan komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil adalah:

1. Komunikasi publik berorientasi kepada si pembicara atau sumber. Sedangkan pada komunikasi interpersonal dan kelompok kecil terdapat hubungan timbal balik di antara si pembicara dengan si penerima yang terlibat. Pada komunikasi organisasi publik, si pembicara mendominasi hubungan.
2. Pada komunikasi publik melibatkan sejumlah besar penerima tetap pada komunikasi interpersonal biasanya hanya 2 orang dan komunikasi kelompok kecil tidak lebih 5 – 7 orang penerima.
3. Pada komunikasi publik kurang terdapat interaksi antara si pembicara dengan pendengar. Hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara si pembicara dengan si pendengar lebih-lebih bila pendengarnya makin banyak.
4. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik lebih umum supaya dapat dipahami oleh pendengar.

Tujuan umum dari komunikasi publik terutama sekali adalah untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi misalnya mengenai aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Selain itu komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Komunikasi publik juga dapat digunakan untuk memberi hiburan. Tujuan-

tujuan tersebut berhubungan satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum juga terdapat tujuan khusus yang perlu ditetapkan. Tujuan-tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan dalam kalimat yang lengkap.

Organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya terutama dengan badan-badan yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi itu sendiri. Sekarang kebanyakan organisasi merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya yang menangani khusus masalah promosi, penyiaran pers, kajian-kajian khusus, pertunjukan, dan darmawisata. Kebanyakan organisasi telah menyadari pentingnya komunikasi public ini dan telah mempunyai program-program khusus untuk itu. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya sekarang kita jumpai berbagai media yang digunakan untuk itu seperti brosur, majalah, surat-surat edaran CCTV dan poster.

2.3 Peran

Soekanto (1990 : 268) mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan, maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Tangkilisan, (2005 : 266), Peran memiliki arti serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Pengharapan yang terdapat dalam peran merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peran. Konsep peran sangat diperlukan untuk mengetahui dan memahami keselarasan atau integrasi antar tujuan dan misi yang ingin dicapai.

Peran-peran diajarkan melalui sosialisasi dan interaksi. Seseorang harus belajar mengetahui peran yang dijalankannya serta peran yang dijalankan orang lain melalui sebuah interaksi dan sosialisasi. Adanya interaksi dalam masyarakat akan menciptakan hubungan antar peran-peran individu dalam masyarakat. Seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajibannya dari statusnya.

Peran berarti laku, bertindak. Peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat

(E.St. Harahap, dkk, 2007: 854). Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu *pertama* penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

2.4 Pencitraan

Citra didefinisikan sebagai: (1) kata benda: gambar, rupa, gambaran, (2) gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau produk, (3) kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi, (4) data atau informasi dari potret udara untuk bahan evaluasi. Katz dalam Soemirat dan Ardianto (2004) mengatakan bahwa citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite atau suatu aktivitas. Menurut Jefkins (2003) terdapat beberapa jenis citra dengan definisinya, sebagai berikut:

1. Citra bayangan (*mirror image*), citra ini melekat pada orang dalam atau anggota organisasi (biasanya adalah pemimpinnya) yaitu anggapan pihak luar tentang organisasi.
2. Citra yang berlaku (*current image*), citra atau pandangan yang dianut oleh pihak luar mengenai suatu organisasi.
3. Citra yang diharapkan (*wish image*), citra yang diinginkan pihak manajemen.
2. Citra perusahaan (*corporate image*), citra dari organisasi secara keseluruhan, jadi bukan sekedar citra atas produk dan pelayanannya.
3. Citra majemuk (*multiple image*), munculnya citra yang belum tentu sama dengan organisasi secara keseluruhan karena banyaknya jumlah karyawan, (individu), cabang atau perwakilan dari suatu perusahaan atau organisasi.

Soemirat dan Ardianto (2004) mengemukakan efek kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi proses pembentukan citra seseorang. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan.

Menurut Hubeis (2001) efektivitas *public relation* di dalam pembentukan citra (nyata, cermin dan aneka ragam) organisasi, erat kaitannya dengan kemampuan (tingkat dasar dan lanjut) pemimpin dalam menyelesaikan tugas organisasinya, baik secara individual maupun tim yang dipengaruhi oleh praktek berorganisasi (*job design, reward system, komunikasi dan pengambilan keputusan*) dan manajemen waktu/perubahan dalam mengelola sumber daya (materi, modal dan sumberdaya manusia) untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif, yaitu mencakup penyampaian perintah, informasi, berita dan laporan, serta menjalin hubungan dengan orang. Hal ini tentunya terkait erat dengan penguasaan identitas diri yang mencakup aspek fisik, personal, kultur, hubungan organisasi dengan pihak pengguna, respons dan mentalitas pengguna. Citra humas yang ideal menurut Anggoro (2002) adalah kesan yang benar, yakni sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman atas kenyataan yang sesungguhnya. Itu berarti citra tidak seharusnya dipoles supaya lebih indah dari warna aslinya, karena hal itu justru dapat mengacaukannya.

Pencitraan menjadi penting dalam konteks relasi dengan media karena dengan pencitraan akan didapat struktur berita dan peristiwa bagi tujuan yang lebih maksimal dalam peliputan media (McNair, 1990:140). Seseorang maupun lembaga yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan media massa tentu tidak akan memperoleh porsi pemberitaan yang mencukupi. Sikap negatif dari seseorang ataupun lembaga terhadap awak media, seperti memusuhi para wartawan, akan mendapat bingkai berita di media massa yang bersifat negatif juga.

Semakin tingginya kesadaran membangun citra diri maupun lembaga dalam usaha mendapatkan simpati media massa ini semakin terlihat pada masa sekarang. Citra yang dibangun atas lembaga berkorelasi dengan nilai berita, yang kemudian menjadi pertimbangan utama redaksi untuk menugaskan wartawannya meliput dan sekaligus menjadi pertimbangan redaksi untuk meloloskannya dalam rapat redaksi. Dengan demikian, lembaga harus bias membangun pencitraan yang memiliki nilai berita yang tinggi.

2.5 Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Public Relations (PR) adalah suatu bentuk komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian (Jefkins, 2003). PR menggunakan metode manajemen berdasarkan tujuan (*management by objectives*). Sedangkan *British Institute Public Relations* mendefinisikan PR adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (*good will*) dan saling pengertian antara organisasi dengan publiknya. Menurut mantan PRO Universitas Winconsin-Reiver Fall, Barbara Averill (1997), salah satu bagian dari PR adalah *media relations* yang bisa menjadi perangkat yang sangat unik dan efisien. Begitu kita bisa menyusun pesan yang bukan saja diterima, melainkan juga dianggap penting oleh media lokal, maka kita sudah membuat langkah besar menuju keberhasilan program kita. Averill menyamakan *media relations* dengan publisitas.

Lesly (1991: 7) menjelaskan bahwa *media relations* berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespons kepentingan media terhadap organisasi. Yosol Iriantara (2005: 29-30) menyebutkan bahwa *media relations* bisa dilihat keterkaitannya dengan beberapa hal.

Pertama, media relations pada dasarnya berkenaan dengan media komunikasi. Hal ini diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien dalam berkomunikasi dengan publik. Agar komunikasi dengan publik tersebut terpelihara, maka segala kepentingan media massa terhadap organisasi mesti direspons oleh organisasi. Tujuannya adalah keberhasilan program. Dalam pengertian *media relations* tersebut, bila diringkaskan kurang lebih bisa menjadi: mempromosikan organisasi melalui media masa.

Kedua, media relations pada dasarnya berkenaan dengan pemberian informasi atau memberi tanggapan pada media pemberitaan atas nama organisasi atau klien. Karena berhubungan dengan media massa itulah, maka ada yang menyebutkan bahwa *media relations* itu merupakan fungsi khusus di dalam satu kegiatan atau program PR.

Mempromosikan organisasi melalui media massa itu pertama-tama tentunya ditentukan kepada publik eksternal. Itu sebabnya digunakan oleh media massa untuk mengkomunikasikannya. Ini sejalan dengan tugas penting *external public relations* yang oleh salah seorang perintis pendidikan PR di Indonesia, Oemi Abdurrachman dalam Yosol Iriantara (2005 : 30) dikatakan sebagai "...mengadakan komunikasi yang efektif, yang sifatnya informatif dan persuasif yang ditunjukkan kepada publik di luar badan itu".

Menurut Heryanto dan Zarkasy (2002:53) ada beberapa prinsip umum yang perlu diperhatikan oleh setiap praktisi PR Politik dalam rangka menciptakan dan membina hubungan media dengan baik.

1. *Memahami dan melayani media.* Seorang praktisi PR Politik harus memahami karakteristik media, misalnya, kekhasan media televisi, media cetak, radio, dan media baru.
2. *Membangun reputasi sebagai orang yang dipercaya.* Para praktisi PR Politik harus senantiasa siap menyediakan materi-materi yang akurat di mana saja dan kapan saja dibutuhkan. Hanya dengan cara inilah ia akan diakui sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh para jurnalis.
3. *Menyediakan salinan yang baik.* Misalnya, menyediakan reproduksi foto yang baik, menarik, dan jelas. Contoh lain, menyediakan salinan pidato politik tokoh lembaga/kandidat, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengutipan.

4. *Bekerja sama dengan penyediaan materi.* Contoh, petugas PR politik dan jurnalis dapat bekerja sama dalam mempersiapkan sebuah wawancara atau temu pers dengan tokoh-tokoh tertentu.
5. *Menyediakan fasilitas verifikasi.* Para praktisi PR politik perlu member kesempatan kepada para jurnalis untuk melakukan verifikasi atas setiap materi yang mereka terima. Misalnya, menyangkut data atau hasil riset yang terkait dengan lembaga/kandidat politik.
6. *Membangun hubungan personal yang kokoh.* Suatu hubungan personal yang kokoh dan positif hanya akan tercipta dan terpelihara apabila dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, kerja sama, dan sikap saling menghormati profesi masing-masing.

2.6 Media Massa

Pers merupakan salah satu perwujudan dari hak kebebasan berbicara, berpendapat yang diatur dalam UUD 45 pasal 28. Undang-Undang yang mengatur tentang pers adalah UU No.11 Tahun 1966 dan UU No 40 Tahun 1999.

Definisi media massa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan maupun gambar dalam segala jenis media. Dalam arti luas pers diartikan sebagai semua media baik cetak maupun elektronik (Koran, radio, televisi dll). Dalam arti sempit pers diartikan sebagai media cetak saja (Koran, majalah dll).

Hukum mengenai *mass-communications*, pers khususnya, yang meliputi aturan-aturan mengenai publikasi (*publication*), mengenai perusahaan (*enterprise regulation*), aturan mengenai profesinya (*profesional regulation*), dan aturan internasional(*international regulation*) mengandung didalamnya segal etik yang mengandung aturan-aturan hukum, kesusilaan, moral dan agama.

Diketahui bahwa usaha yang bersangkutan dengan pers dan informasi sering menjadi subjek dari aturan-aturan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan dan kadang-kadang perversi dari kebebasan untuk menyatakan pendapatnya. Dan mengatur hasil final dari penyebaran pemberitaan dan pendapat dalam publikasinya.

Karena itu dia dimuat dalam aturan hukum, dalam *code of publication*, yaitu pembatasan repressif terhadap kebebasan untuk menyatakan pendapat

Media massa, dalam berbagai bentuk mulai media massa konvensional seperti Koran, majalah, tabloid, radio, dan televisi semakin berkembang sebagai aktor politik maupun sebagai media politik. Sebagai aktor politik, media massa mampu memerankan dirinya sebagai pilar keempat demokrasi, beriringan dengan lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Sebagai media politik, media massa juga dimanfaatkan oleh partai politik sebagai medium untuk menjembatani partai politik dan khalayak luas.

Media massa adalah elemen penting dalam proses komunikasi politik, karena tanpa media massa pesan politik tidak mampu menjangkau khalayak luas dalam waktu yang cepat dan sekaligus massif. Melalui media massa, aktor politik dapat menyampaikan pesan-pesan politik yang ditransmisikan oleh media massa pada khalayak luas. Media massa dalam komunikasi politik bahkan bukan hanya berperan sebagai penyampai (*transmitter*) dari pesan-pesan politik yang dilakukan oleh aktor politik pada khalayak, namun media massa juga berperan sebagai aktor politik dalam proses politik sebagaimana aktor-aktor politik lainnya.

Dalam sistem politik yang demokrasi, fungsi media adalah sebagai saluran komunikasi politik yang awalnya berasal dari luar media itu sendiri dan sekaligus juga sebagai pengirim dari pesan-pesan politik yang dikonstruksi oleh jurnalis (McNair, 1999: 11).

2.6.1 Bidang-bidang Media

Media cetak, seperti koran, tabloid, majalah, dan jurnal, biasanya terdiri dari empat departemen atau bidang, yakni sebagai berikut.

2.6.1.1 *Departemen editorial*, bertugas menangani isi atau aspek editorial dari media. Departemen ini sangat penting karena terkait dengan substansi produk media yang bersangkutan. Berita politik, hukum,

olahraga, kesehatan, dan lain-lain, menjadi rubric yang harus dikerjakan secara baik dan tepat oleh bidang ini.

2.6.1.2 *Departemen iklan*, menangani fungsi pendapatan perusahaan dengan cara menjual ruang atau kolom di media cetak yang bersangkutan. Bagian ini biasanya terhubung dengan para biro iklan yang bertindak sebagai perantara antara pihak pengiklan dan media.

2.6.1.3 *Departemen produksi*, berfungsi mengarahkan, mengatur, atau merekayasa tata letak isi berita dan iklan secara keseluruhan supaya terlihat bagus, menarik minat pembaca.

2.6.1.4 *Departemen sirkulasi*, berfungsi atas pendapatan perusahaan yang bersumber dari penjualan koran secara langsung kepada para pembaca.

2.6.2 Varian Segmen Media

Setiap media cetak yang ada saat ini biasanya memiliki varian segmen yang harus diketahui oleh para praktisi PR politik. Beberapa hal yang harus dipahami dari cara kerja media cetak tersebut antara lain seperti berikut.

2.6.2.1 Rutinitas media: apakah media cetak itu bersifat harian, mingguan atau bulanan. Karena sifat rutinitas media ini akan menentukan pendekatan dan penyediaan bahan berita. Misalnya, untuk harian, maka jenis penulis berita *straight news* yang dominan digunakan. Sementara ini, untuk majalah mingguan, tentunya *feature news* atau *indepth news* yang dominan dipakai.

2.6.2.2 Orang-orang yang terlibat dalam pengumpulan berita karena akan menentukan pilihan hubungan dengan orang-orang media cetak. Misalnya, reporter, koresponden, wartawan lokal (*stringers*), koresponden

asing/luar negeri (*foreign correspondents*), penuli artikel, kontributor lepas, jasa telegram (*wire services*), kantor-kantor berita (*news agencies*), agen dan perpustakaan photo, sindikasi (*syndication*), dan sumber-sumber lain. Dalam konteks sumber-sumber lain inilah biasanya para praktisi PR menjadi penyedia utama bahan untuk berita, kolom iklan, wawancara, gagasan-gagasan, materi baru, dan sebagainya.

2.6.2.3 Segmen media, terkait dengan siapa segmen utama pembacanya. Misalnya, segmen pembaca menengah ke atas atau menengah ke bawah, untuk pembaca berpendidikan atau masyarakat awam, topiknya umum atau topik-topik khusus, seperti politik, olahraga, fashion, sejarah, kuliner, dan lain-lain.

2.6.2.4 Jaringan media, terkait dengan keberadaan media tersebut di tengah kompetisi dengan media-media lain. Misalnya, apakah media yang akan digunakan ini berhubungan dengan sebuah grup media besar atau tidak. Jika media tersebut punya jaringan, tentu seorang praktisi PR politik harus cerdas mencari peluang agar informasi yang disediakan juga bisa terpublikasikan di media-media lain yang masih satu jaringan.

2.6.2.5 Kepemilikan media, terkait dengan keterhubungan media tersebut dengan pemilik. Jangan sampai PR politik yang dilakukan jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan dari pemilik media yang bersangkutan. Misalnya, sebuah partai politik mengembangkan hubungan media dengan membeli rubrik di media yang secara politik jelas berafiliasi ke partai kompetitor.

2.7 Fungsi Pertahanan Negara

Dasar mengenai sistem pertahanan Indonesia dalam UUD 1945 terletak pada Bab XII tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan

keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Pertahanan nasional adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara yang meliputi keutuhan wilayah dan juga keselamatan masyarakat dari segala gangguan yang mengancam keutuhan negara. Pertahanan negara merupakan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan yang bersifat semesta yang diselenggarakan dengan kesadaran hak serta kewajiban sebagai warga negara dan juga keyakinan akan kekuatan sendiri. Pertahanan negara atau pertahanan nasional diselenggarakan oleh pemerintah melalui sistem pertahanan negara. Pertahanan Nasional adalah gabungan kekuatan antara sipil dan militer yang diupayakan oleh negara untuk melindungi integritas wilayahnya. Pertahanan negara merupakan tugas utama Kementerian Pertahanan. Dokumen Strategi Pertahanan menyebutkan bahwa ancaman terhadap pertahanan nasional dikategorikan dalam dua kelompok, yakni ancaman militer dan ancaman nirmiliter yang mencakup ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ancaman berbasis teknologi dan informasi, serta ancaman berdimensi keselamatan umum (Dephan, 2007:30-46). Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, maka dibangunlah sebuah sistem pertahanan nasional yang melibatkan seluruh

warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional (Dephan, 2007:71)

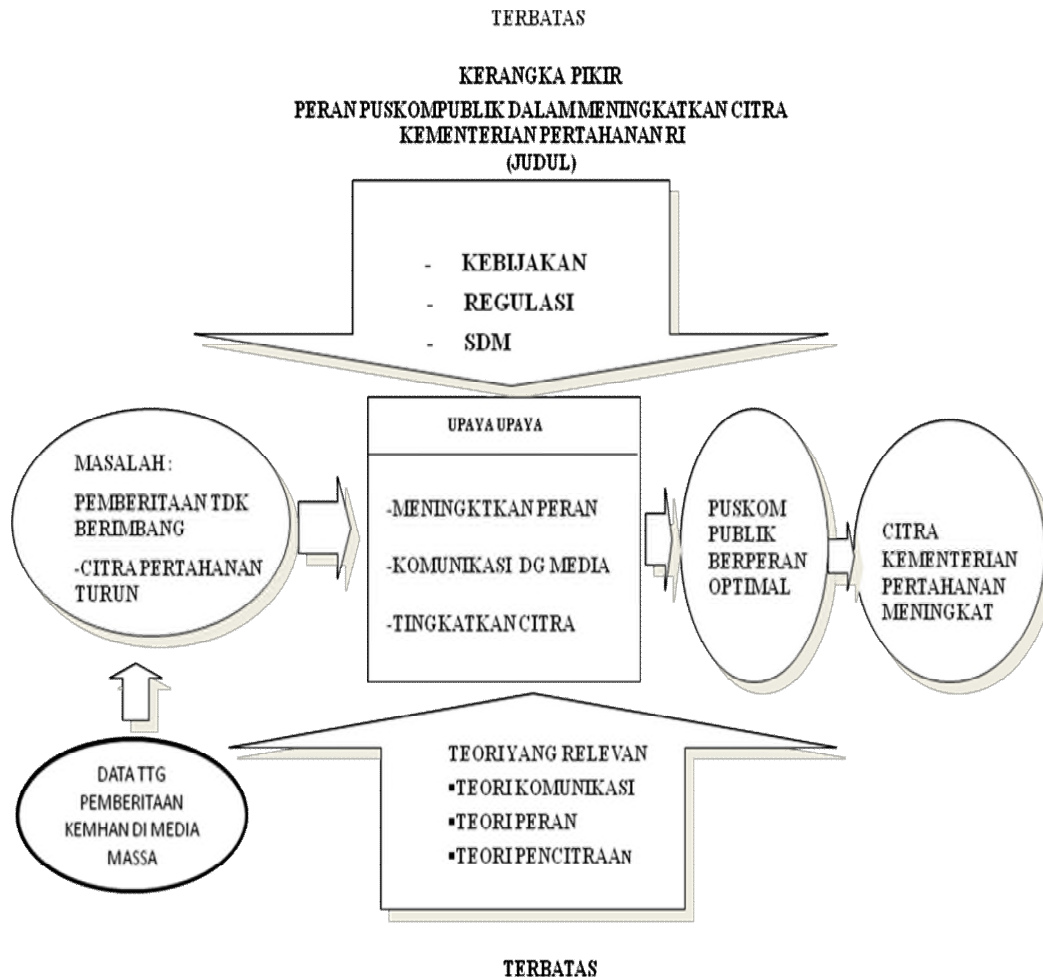
Pertahanan militer terdiri dari TNI sebagai Komponen Utama, dan Komponen Cadangan serta Komponen Pendukung yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional. Pertahanan nirmiliter dibentuk di dalam unsur masyarakat dengan koordinasi dari departemen pemerintahan terkait baik itu untuk menghadapi ancaman dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi (Dephan, 2007:71-101)

Dokumen-dokumen resmi pertahanan menegaskan bahwa penyelesaian masalah pertahanan dilakukan pertama-tama melalui cara damai. Dokumen Strategi Pertahanan mengatakan bahwa diplomasi yang efektif adalah lini terdepan pertahanan yang dapat diandalkan (Dephan, 2007:30-46). Buku Putih menyatakan bahwa penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya sebagai jalan terakhir setelah usaha-usaha diplomatik tidak membuahkan hasil (Dephan, 2003:51). Doktrin Pertahanan menjabarkan bahwa pertahanan militer adalah kekuatan pendukung upaya diplomasi sebagai fungsi pertahanan nirmiliter yang mana pertahanan militer tersebut hanya akan diberdayakan seandainya upaya diplomasi tidak membuahkan hasil (Dephan, 2007:103)

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir diawali dengan munculnya banyak data yang terekam di Puskom Publik tentang pemberitaan Kemhan. Informasi yang diberitakan baik berita positif maupun negative tidak selalu berimbang. Hal ini menjadi salah satu penyebab citra Kemhan menurun. Puskom Publik sebagai bagian dari Kemhan bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan dilakukannya upaya-upaya untuk meningkatkan citra Kemhan dengan berperan secara optimal dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya dan kompetensi yang dimiliki Puskompublik. Upaya lainnya adalah membina hubungan baik dengan media massa. Upaya yang ada harus didukung oleh kebijakan yang sejalan antara Kemhan dan Puskom Publik, Regulasi yang

mendukung, dan SDM yang berkualitas. Kerangka berpikir tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
 Kerangka Berpikir Peran Puskom Publik dalam Meningkatkan Citra
 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

2.9 Penelitian Terdahulu yang relevan

Berikut disampaikan tiga penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti saat ini.

2.9.1 Penelitian Lubis.

Penelitian Evawani Elysa Lubis membahas bagaimana peran humas dalam organisasi. Lubis meneliti tentang peran humas dalam membentuk citra di Sekertariat Daerah Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa peran Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 belum dilaksanakan secara optimal karena pencapaian informasi cenderung satu arah.

Faktor penghambat Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam pembentukan citra positif Pemerintah Provinsi Riau antara lain sumber daya manusia, faktor politis, struktur organisasi yang ada di pemerintah Provinsi Riau, kurang memadainya infrastruktur untuk menunjang kegiatan kehumasan, dan kurangnya koordinasi diantara Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan humas-humas yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Faktor pendukung aktivitas Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau mendapat dana langsung dari APBD Provinsi Riau, motivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian Lubis dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Unsur Persamaan Penelitian

No.	Unsur	Persamaan
1.	Fokus Kajian	Peran Humas (Puskom Publik).
2.	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
3.	Teknik Pengumpulan Data	<i>Depth Interview</i> <i>Non-Participation Observation</i>
4.	Teknik Pengambilan Sample	<i>Purposive Sampling</i>

Tabel 2.2
Unsur Perbedaan Penelitian

No.	Unsur	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
1.	Lokasi Penelitian	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Kementerian Pertahanan RI
2.	Jumlah Key Informan	10 orang, terdiri dari 5 orang pegawai Humas Sekda Pemprov Riau, 3 orang wartawan dan 2 orang dari masyarakat	6 orang yang terdiri dari 2 orang pegawai Puskom Publik dan 4 orang awak media massa.
3.	Waktu Penelitian	Tahun 2009	Tahun 2014

2.9.2 Penelitian Rizlani.

Penelitian terdahulu yang relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dinda Rizlani. Penelitian dilakukan pada PT. Mitra Garuda Lestari yaitu sebuah perusahaan multimedia yang menggunakan peran *Public Relations* untuk meningkatkan citranya. Citra yang positif yang dilakukan oleh *Public Relation* sangat bermanfaat guna membentuk persepsi publik terhadap perusahaan, tidak hanya kepada publik namun juga membentuk persepsi terhadap klien maupun calon pelanggan. Ada beberapa yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk mencapainya, seperti melayani klien dengan pekerjaan yang mempunyai kualitas yang bagus dan menjalin hubungan baik.

Selanjutnya ada beberapa peran yang dilakukan oleh *public relations* PT Mitra Garuda Lestari yaitu yang pertama mencari *Interest* Publik, Kedua Menjalinkan hubungan dengan klien, yaitu ada usaha PR dalam menjalin hubungan dengan klien. Dengan demikian, akan membuat klien merasa mempunyai keuntungan jika bekerja sama dengan perusahaan. Ketiga Melakukan promosi melalui *youtube* dan *facebook* walaupun tidak terlalu efektif. Dan keempat Mengatasi Krisis, dalam mengatasi krisis, *Public Relations* diharapkan menjadi barisan pertama

sebagai pertolongan pertama. Perusahaan ini pernah menghadapi krisis namun terjadi pada saat perusahaan belum mempunyai PR. Tidak hanya menangani krisis namun PR bertugas pada saat perusahaan mendapatkan keluhan dari klien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan *Public Relations* pada PT. Mitra Garuda Lestari sudah cukup baik karena mampu menjalankan tugasnya walaupun terhambat masalah ketersediaan sumber daya. Selain itu PR mampu membuat hubungan baik dengan klien yang menyebabkan klien merasa nyaman untuk membuat kerjasama lagi. PR juga menjalankan tugas nya sebagai pihak yang turut membantu dalam menghadapi keluhan-keluhan dari klien.

Persamaan dan perbedaan penelitian Rizlani dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Unsur Persamaan Penelitian

No.	Unsur	Persamaan
1.	Fokus Kajian	Peran Humas (Puskom Publik).
2.	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
3.	Teknik Pengumpulan Data	<i>Depth Interview</i> <i>Non-Participation Observation</i>
4.	Teknik Pengambilan Sample	<i>Purposive Sampling</i>

Tabel 2.4
Unsur Perbedaan Penelitian

No.	Unsur	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
1.	Lokasi Penelitian	PT. Mitra Garuda Lestari (perusahaan Multi Media)	Kementerian Pertahanan RI
2.	Jumlah Key Informan	3 orang, yang terdiri dari pimpinan perusahaan, PR perusahaan dan salah satu klien perusahaan	6 orang yang terdiri dari 2 orang pegawai Puskom Publik dan 4 orang awak media massa.
3.	Waktu Penelitian	Tahun 2011 dan 2012	Tahun 2014

2.9.3 Penelitian Fathurohim Widodo Muktiyo.

Penelitian lain yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fathurohim Widodo Muktiyo yang mengangkat masalah Peran Humas dalam Membangun Citra Positif di Mata Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Peran Humas Sentra Komunikasi Mitra Polri dalam Membangun Citra Positif di Mata Masyarakat Guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban di Kota Solo). Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran PR dalam membangun citra organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada bagian khusus dalam Senkom Mitra Polri yang melaksanakan seluruh kegiatan humas. Humas bertindak sebagai *method of communication* yaitu bahwa setiap pemimpin maupun anggota di suatu organisasi (divisi lain), baik kecil maupun besar dapat melaksanakan PR.

Persamaan dan perbedaan penelitian Fathurohim Widodo Muktiyo dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.5
Unsur Persamaan Penelitian

No.	Unsur	Persamaan
1.	Fokus Kajian	Peran Humas Senkom Mitra Polri
2.	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
3.	Teknik Pengumpulan Data	<i>Depth Interview</i> <i>Non-Participation Observation</i>
4.	Teknik Pengambilan Sample	<i>Purposive Sampling</i>

Tabel 2.6
Unsur Perbedaan Penelitian

No.	Unsur	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Sekarang
1.	Lokasi Penelitian	<i>Corporate social Responsibility</i>	Kementerian Pertahanan RI
2.	Jumlah Key Informan	Pimpinan, Humas, dan anggota Senkom Mitra Polri, serta masyarakat umum.	6 orang yang terdiri dari 2 orang pegawai Puskom Publik dan 4 orang awak media massa.
3.	Waktu Penelitian	Tahun 2010	Tahun 2014

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang sebagaimana dikemukakan oleh Hadari Nawawi (1989), sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian pada saat penelitian dilakukan dengan mendasarkan diri pada fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas social yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Pendekatan ini digunakan karena disesuaikan dengan permasalahan penelitian yang ada, yaitu berusaha mengkaji tentang bagaimana peran Puskompublik dalam meningkatkan citra Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bungin (2009 : 69), format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk; masalah-masalah efek media terhadap pandangan pemirsa terhadap suatu tayangan media; permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat dan sebagainya.

Sementara analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini berusaha mengkaji tentang bagaimana peran media massa dalam system pertahanan negara. Julia Branen (1997) mengemukakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencari pola hubungan antara konsep-konsep yang sebelumnya tidak ditentukan dengan melakukan pengamatan melalui lensa-lensa yang lebar.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

3.2.1 Wawancara, yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2001). Informan dalam penelitian ini adalah KP Publik Kemhan, Kabid Pemberitaan Puskom Publik Kemhan, Redaktur Pelaksana Harian Kompas, Wartawan Harian Media Indonesia, Wartawan Harian Kompas, Wartawan Rakyat Mardeka, Penyiar Radio KBR 68 H, Wartawan Harian Jurnal Jakarta, Wartawan Pelita, dan Staf pelaksana pemberitaan dan opini Puskompublik.

3.2.2 Observasi, yaitu pengamatan terhadap kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Kata observasi dan pengamatan digunakan secara bergantian. Seseorang yang sedang melakukan pengamatan, tidak selamanya menggunakan pancaindra mata saja, tetapi selalu mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan oleh pancaindra lainnya. Pengamatan dilakukan dengan melihat bagaimana proses kerja pengolahan informasi yang masuk ke Puskom Publik menjadi sebuah pemberitaan yang akan disampaikan kepada publik serta interaksi Puskom Publik dengan lembaga lain seperti media massa (Bungin, 2001).

3.2.3 Dokumenter, yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Intinya metode *documenter* adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2001). Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa

profil organisasi, data personel, sarana dan prasarana, serta pemberitaan-pemberitaan yang berhasil dikumpulkan oleh Puskom Publik.

3.3 Unit Analisis dan *Key Informan*

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu seluruh pegawai Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia beserta awak media massa.

3.4 Teknik Penarikan *Key Informan*

Dalam mencari informasi yang dibutuhkan, maka perlu ditentukan siapa yang akan menjadi *key informan* (nara sumber) dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*), yaitu teknik pengumpulan sumber informasi yang tersedia secara tepat dimaksudkan untuk mengoptimalkan informasi dari target yang lebih spesifik, atau sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kapuskompublik Kemhan
2. Kabid Pemberitaan Puskom Publik Kemhan
3. Redaktur Pelaksana Harian Kompas
4. Wartawan Harian Media Indonesia
5. Wartawan Harian Kompas
6. Wartawan Rakyat Merdeka
7. Penyiar Radio KBR 68 H
8. Wartawan Harian Jurnal Jakarta
9. Wartawan Pelita
10. Staf pelaksana pemberitaan dan opini Puskompublik

3.5 Teknik Analisis Data

Secara ringkas, tahapan analisis data yang diperoleh di lapangan adalah sebagai berikut.

3.5.1 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi atau pengamatan langsung, yang didukung oleh data kepustakaan maupun wawancara, yang bertujuan untuk menghimpun data yang dibutuhkan.

3.5.2 Penilaian Data

Dalam melakukan penilaian terhadap data, aspek/prinsip validitas (kesahihan), objektivitas dan realibilitas (keandalan) selalu menjadi acuan yang dilakukan dengan menempuh cara-cara sebagai berikut: (a) mengategorikan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan system pencatatan yang relevan; (b) melakukan kritik atau evaluasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya dalam pemeriksaan keabsahan data dipergunakan teknik triangulasi data atau sumber. Model penelitian triangulasi data yang mengarahkan peneliti dalam mengambil data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dapat menggunakan satu jenis sumber data misalnya informan, tetapi beberapa informan atau narasumber yang digunakan perlu diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbeda-beda. Teknik triangulasi sumber dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, misalnya narasumber tertentu, dari kondisi tertentu, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen.

3.5.3 Interpretasi Data

Adapun interpretasi terhadap data yang ada, dilakukan dengan cara analisis berdasarkan pengetahuan dan pemahaman intelektual yang didukung oleh pengalaman empiris terhadap fakta atau data dan informasi yang telah dikumpulkan dan disusun, selanjutnya dituangkan dalam bentuk essay ilmiah maupun dalam bentuk tabel.

3.5.4 Penyimpulan Data

Tahapan penyimpulan selanjutnya dilakukan setelah melakukan interpretasi dan analisis data.

3.6 Definisi Konsep

Untuk memperjelas konsep yang digunakan yang membatasi focus dan objek penelitian, maka dalam penelitian ini dibuatlah beberapa definisi konsep yaitu:

3.6.1 Peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

3.6.2 Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan.

3.6.3 Komunikasi politik merupakan diskusi yang murni membicarakan tentang pengalokasian sumber daya-sumber daya (*resources*), kewenangan resmi seseorang yang diberi kekuasaan (untuk membuat peraturan, keputusan legislative dan eksekutif) dan sanksi-sanksi resmi (dari apa yang negara berikan berbentuk *reward* atau hukuman).

3.6.4 Humas (*Public Relation*) merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (*good will*) dan saling pengertian antara organisasi dengan publiknya.

3.6.5 Media massa adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan maupun gambar dalam segala jenis media.

3.6.6 Pertahanan negara merupakan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan yang bersifat semesta yang diselenggarakan dengan kesadaran hak serta kewajiban sebagai warga negara dan juga keyakinan akan kekuatan sendiri.

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini yang membatasi focus pembahasan adalah peran birokrasi yang melaksanakan tugasnya sebagai organ negara yang meliputi empat fungsi dengan indicator-indikatornya seperti yang disampaikan Heywood (dalam setiyono, 2012) adalah sebagai berikut :

3.7.1 Melaksanakan Tugas Administratif

Indikatornya adalah :

- 3.7.1.1 Melaksanakan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan
- 3.7.1.2 Menentukan bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan secara terperinci.
- 3.7.1.3 Membentuk atau menawarkan kebijakan.
- 3.7.1.4 Melakukan usaha pencapaian hasil
- 3.7.1.5 Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diperoleh.

3.7.2 Memberi Nasihat Kebijakan

Indikatornya adalah :

- 3.7.2.1 Menyediakan informasi dan nasihat atau saran-saran kepada lembaga dalam mengambil suatu kebijakan.
- 3.7.2.2 Memberikan berbagai pilihan tentang garis besar sebuah kebijakan (*outlining the policy options*).
- 3.7.2.3 Memberikan pandangan (*reviewing policy proposals*).

3.7.3 Tugas Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Indikatornya adalah :

- 3.7.3.1 Membina hubungan baik dengan pihak lain.

3.7.3.2 Memperhatikan suara dan kepentingan pihak lain.

3.7.4 Tugas Menjaga Stabilitas Politik

Indikatornya adalah :

3.7.4.1 Imparsialitas

3.7.4.2 Netralitas politik

3.7.4.3 Kepermanenan

3.7.4.4 Anonimitas

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang kondisi umum tentang objek penelitian yaitu Kementerian Pertahanan, khususnya Puskom Publik. Penyajian data hasil wawancara serta analisisnya juga akan disampaikan dalam bab ini.

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pusat Komunikasi Publik pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Subbab ini akan memaparkan secara ringkas tentang sejarah Kementerian Pertahanan serta salah satu bagian dari Kemhan yaitu Puskom Publik.

4.1.1 Sejarah Singkat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 roda pemerintahan segera bergerak, antara lain dengan pemindahan kekuasaan yang di selenggarakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, segera menyusun kabinet pertama yaitu tipe Presidensial dan hasilnya diumumkan pada 19 Agustus 1945. Kabinet ini memiliki 15 Kementerian serta 5 Kementerian Negara, namun salah satu jabatan Menteri Negara lalu di tiadakan karena menteri yang bersangkutan yaitu AA Maramis diangkat menjadi Menteri Keuangan (Sejarah kementerian pertahanan, Website Kemhan, *www. Kemhan.go.id*).

Pada kabinet pertama tersebut belum memiliki Menteri Pertahanan, dan fungsi Kementerian Pertahanan Negara ada di dalam Kementerian Keamanan Rakyat, yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Rakyat, yakni mantan Sodancho Suprijadi. Sebagaimana diketahui bahwa Suprijadi tidak pernah menduduki posisi sebagai Menhan dan selanjutnya posisi Menhan digantikan oleh Sulyadikusumo sebagai Menteri ad interim pada 20 Oktober 1945.

Pada masa kabinet Sjahrir ke-1 yaitu periode 14 November 1945-12 Maret 1946 fungsi pertahanan negara juga masih berada di bawah wewenang Menteri Keamanan Rakyat, yang dijabat oleh Mr. Amir Sjarifuddin. Namun pada kabinet Sjahrir ke-2 periode 12 Maret - 2 Oktober 1946, dibentuk Kementerian Pertahanan yang dijabat oleh Mr. Amir Sjarifuddin. Di dalam kabinet ini fungsi pertahanan keamanan mulai ditekankan.

Dalam Perjalanannya, jabatan Menteri Pertahanan sering dijabat rangkap oleh satu orang, seperti PM Amir Sjarifuddin pada kabinetnya (3 Juli – 11 November 1947), yang menunjukkan betapa pentingnya fungsi pertahanan negara dalam menghadapi beragam konflik yang terjadi pada saat itu.

Pada periode Kabinet Hatta ke-1 periode 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949, saat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam keadaan darurat akibat tekanan tentara Belanda, Wapres Drs. Moh. Hatta merangkap sebagai Menteri Pertahanan ad interim. Namun pada 15 Juli 1949 jabatan Menhan dipegang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sri Sultan juga menjabat Menhan pada masa Kabinet Hatta ke-2 dan Kabinet Republik Indonesia Serikat hingga 6 September 1950, dan kemudian menjabat lagi pada beberapa kabinet berikutnya hingga mundur atas permintaan sendiri pada 2 Juni 1953. Pada kabinet Pembangunan I di Era Orde Baru, mulai 6 Juni 1968 jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dirangkap Persiden RI Jenderal TNI Soeharto.

Baru kemudian pada kabinet Pembangunan II periode 28 Maret 1973 – 29 Maret 1978, jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan diemban oleh satu orang, yakni oleh Jenderal TNI Maraden Panggabean. Selanjutnya pada Kabinet Pembangunan III periode 28 Maret 1978 – 19 Maret 1983, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI diserahkan kepada Jenderal TNI M. Jusuf, dan pada periode ini lahir UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI.

Pada kabinet berikutnya, periode 19 Maret 1983 – 23 Maret 1988 jabatan Menteri Pertahanan Keamanan RI di pegang oleh Jenderal TNI (Purn) Poniman. Seterusnya, Menhankam dijabat oleh Jenderal TNI (purn) LB Moerdani mulai tahun 1988 - 1993. Kemudian tahun 1993 - 1998 Presiden Suharto mempercayai Jenderal TNI (purn) Edi Sudrajat sebagai Menteri Pertahanan Keamanan.

Menjelang detik-detik Reformasi, dimana selanjutnya Presiden RI Soeharto mengundurkan diri, Jenderal TNI Wiranto memegang jabatan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan RI 14 Maret 1998 - 21 Mei 1998. Saat itu terjadi pergantian Presiden RI dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden RI, B.J. Habibie. Kemudian, pada masa kabinet pertama Era Reformasi 22 Mei 1998 - 29 Oktober 1999 Jenderal TNI Wiranto tetap dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan Keamanan.

Dalam perjalanannya, dimasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur, pada 1 Juli 2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi lepas dari Departemen Hankam, dan TNI menjadi lembaga otonom yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Pada era Kabinet yang dipimpin Gus Dur, pada 1 Juli 2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi dilepas dari Departemen Hankam dan TNI menjadi lembaga otonom yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Pada era Kabinet yang di pimpin oleh Gus Dur, Jabatan Menteri Pertahanan kembali dipegang oleh kalangan sipil, berasal dari kalangan akademisi, yaitu Prof. Dr. Juwono Sudarsono periode 1999-2000, dan periode 26 Agustus 2000 - 14 Agustus 2001 dijabat oleh Prof. Dr. Mahfud M.D. Pada era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri mulai 14 Agustus 2001 - 25 Oktober 2004 jabatan Menteri Pertahanan dipercayakan kepada H. Matori Abdul Djalil (Sejarah kementerian pertahanan, Website Kemhan, [www. Kemhan.go.id](http://www.Kemhan.go.id)).

Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I mulai 29 Oktober 2004 - 26 Oktober 2009 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Prof. Dr. Juwono Sudarsono ditempatkan kembali sebagai

Menteri Pertahanan RI. Sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan masalah “pertahanan” disusun dan di ajukan ke DPR untuk disahkan menjadi UU, antara lain RUU Komponen Cadangan, RUU Keamanan Nasional, RUU Rahasia Negara, RUU Peradilan Militer dan RUU Veteran.

Selanjutnya pada Kabinet Indonesia Bersatu Ke II periode 2009 – 2014 yang kembali berada di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jabatan Menhan dipercayakan kepada Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, MA, Msc yang dalam Kabinet Indonesia Bersatu I menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral / ESDM dan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MBA sebagai Wakil Menteri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 tentang Kementerian Negara, nama Departemen Pertahanan RI pun berubah menjadi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Langkah-langkah dan sasaran kebijakan Kementerian Pertahanan sangat beragam, sangat tergantung situasi dan kondisi serta Pimpinan Negara saat itu dan siapa yang dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Yang pasti, Kemhan RI, sejak era Proklamasi, masa Orde Lama, Orde Baru hingga di Era Reformasi, sekarang dan ke depan Kemhan senantiasa tetap pada posisi yang sangat strategis dan berperan penting dalam menjaga keamanan Negara dan keselamatan bangsa, serta kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

4.1.1.1 Visi & Misi Kemhan

Berbalut visi yaitu “Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh” serta misi untuk mewujudkan visi tersebut yaitu “Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Keselamatan Bangsa”. Dalam rangka mengimplementasi misi tersebut Kemhan RI merumuskan Grand Strategy yaitu :

Pertama, memberdayakan wilayah pertahanan dalam menghadapi ancaman. *Kedua*, menerapkan Manajemen Pertahanan yang Terintegrasi. *Ketiga*, meningkatkan Kualitas Personel Kementerian Pertahanan/ TNI.

Keempat, mewujudkan Teknologi Pertahanan yang Mutakhir. *Kelima*, menetapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat dalam Belanegara.

4.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kemhan

Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemhan menyelenggarakan fungsi :

Pertama, Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan.

Kedua, Pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan.

Ketiga, Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan.

Keempat, Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Pertahanan terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1. Sekretariat Jenderal
2. Staf Ahli Menteri
3. Inspektorat Jenderal
4. Universitas Pertahanan
5. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
6. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan
7. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
8. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
9. Badan Sarana Pertahanan
10. Badan Penelitian dan Pengembangan.
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan

12. Pusat data dan informasi
13. Pusat Keuangan
14. Pusat Komunikasi Publik
15. Pusat Rehabilitasi Cacat.

4.1.2 Peran Strategis Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan atau biasa disingkat Kemhan merupakan salah satu kementerian dalam jajaran pemerintahan suatu Negara. Kemhan merupakan salah satu kementerian yang membantu tugas presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan khususnya dalam bidang pertahanan Negara (Sejarah kementerian pertahanan, Website Kemhan, *www.Kemhan.go.id*).

Kementerian ini merupakan salah satu dari tiga kementerian bersama yang disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam kekuasaan pemerintah apapun di Indonesia, Kementerian Pertahanan tidak dapat dibubarkan atau diganti oleh presiden.

Menteri Pertahanan sewaktu-waktu sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang dapat menggantikan pelaksanaan tugas kepresidenan jika presiden maupun wakil presiden mangkat dari tugasnya, berhenti atau diberhentikan, atau tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya sebagai presiden atau wakil presiden karena sesuatu dan lain hal.

Kemhan adalah kementerian yang sangat penting dan strategis menyangkut pertahanan dan keamanan Negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian ini, walau beragam namun tetap mengedepankan kepentingan Negara, semuanya dilakukan demi menjaga keutuhan bangsa agar tetap dalam bingkai NKRI, serta menjaga keselamatan bangsa dari ancaman luar.

4.2 Pusat Komunikasi Publik

Pusat Komunikasi Publik disebut Puskompublik adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik, disebut Kapus Kompublik. Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang informasi penyelenggaraan Pertahanan Negara (*Peraturan Menhan no. 16, 2010 tentang SOT Kemhan*).

4.2.1 Tugas Puskompublik

Pusat Komunikasi Publik memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut

1. Pusat Komunikasi Publik selanjutnya disebut Pusat Kompublik adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen.
2. Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh kepala Pusat Komunikasi Publik disebut Kapus Kompublik

Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang informasi penyelenggaraan pertahanan negara.

4.2.2 Fungsi Puskompublik

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- 4.2.2.1 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi pertahanan;
- 4.2.2.2 Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemberitaan, opini dan kerjasama informasi pertahanan;
- 4.2.2.3 Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberitaan, opini dan kerjasama informasi pertahanan;

4.2.2.4 Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis dan perijinan di bidang pemberitaan, opini dan kerjasama informasi pertahanan.

4.2.2.5 Penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data dan informasi, dokumentasi, kepastakaan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

4.2.3 Susunan Organisasi Puskompublik

Pusat Komunikasi Publik terdiri empat sub bagian bagian kerja dan memiliki tugas yang berbeda. Keempat sub bagian itu adalah :

4.2.3.1 Bagian Tata Usaha (Bag. TU)

Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Bagian TU dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, disebut Kabag TU. Yang bertugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, kepegawaian, ketatausahaan serta kerumahtanggaan, pembinaan data dan informasi, dokumentasi serta kepastakaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pusat. Bagian TU terdiri dari :

Pertama, Subbagian Program dan Laporan (Subbagian Proglap)

Subbagian Proglap dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Laporan (Kasubbag Proglap), yang memiliki tugas untuk melakukan penyiapan dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta laporan program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pusat.

Kedua, Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan (Doktaka)

Subbagian Doktaka dipimpin oleh Kepala Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan (Kasubbag Doktaka), yang memiliki tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dokumentasi dan perpustakaan, pemberian dukungan teknis di bidang dokumentasi dan kepastakaan Pusat.

Ketiga, Subbagian Umum (Subbag Um)

Subbagian Um dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum (Kasubbag Um), yang memiliki tugas untuk melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian, pengelolaan materiil dan kerumahtanggaan serta urusan ketatausahaan dan administrasi keuangan Pusat.

4.2.3.2 Bidang Pemberitaan (Bidbra)

Bidang Pemberitaan selanjutnya disebut Bidang Bra, dipimpin oleh Kepala bidang pemberitaan (Kabid Bra). Yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan rumusan dan standardisasi teknis dibidang penyampaian informasi pertahanan serta hubungan media massa. Bidang pemberitaan terdiri dari :

Pertama, Subbidang Peliputan dan Publikasi (Subbid Liputpub)

Subbidang Liputpub dipimpin oleh Kepala Subbidang Peliputan dan Publikasi (Kasubbid Liputpub), yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dan evaluasi serta bimbingan teknis di bidang peliputan dan publikasi informasi pertahanan.

Kedua, Subbidang Produksi (Subbid Prod)

Subbidang Prod dipimpin oleh Kepala Subbidang Produksi (Kasubbid Prod), yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dan evaluasi serta bimbingan teknis di bidang produksi informasi pertahanan.

Ketiga, Subbidang Hubungan Media Massa (Subbidang Hubmedmass)

Subbidang Hubmedmass dipimpin oleh Kepala Subbagian Hubungan Media Massa (Kasubbid Hubmedmass), yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dan evaluasi serta bimbingan teknis di bidang hubungan media massa meliputi koordinasi, fasilitas, kerjasama, press tour dalam rangka peliputan dan pemberitaan.

4.2.3.3 Bidang Opini

Bidang Opini dipimpin oleh Kepala Bidang Opini (Kabid Opini), yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dan evaluasi serta bimbingan teknis di bidang pertahanan. Bidang Opini terdiri dari :

Pertama, Subbidang Opini (Subbidang Siapopni)

Subbidang Siapopni dipimpin oleh Kepala Subbidang Penyiapan Opini (Kasubbid Siapopni), yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisa dan penyiapan opini.

Kedua, Subbidang Pembentukan Opini (Subbidang Tukop)

Subbidang Tukop dipimpin oleh Kepala Subbidang Pembentukan Opini (Kasubbid Tukop), yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan evaluasi serta bimbingan teknis di bidang pembentukan opini.

Ketiga, Subbidang Cyber Media (Subbidang Cyber Media)

Subbidang Cyber Media dipimpin oleh Kepala Subbidang Cyber Media (Kasubbid Cyber Media), yang memiliki tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis di bidang cyber media.

4.2.3.4 Bidang Kerjasama Informasi (Bidang Kermainfo)

Bidang Kerjasama informasi selanjutnya disebut Bidang Kermainfo, dipimpin oleh Kepala Bidang Kerjasama Informasi (Kabid Kermainfo) memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dan standardisasi di bidang hubungan internal dan eksternal Kementerian, pengumpulan, penyusunan, dan penerbitan informasi pertahanan negara. Bidang Kermainfo terdiri dari :

Pertama, Subbidang Kerjasama Kelembagaan (Subbidang Kermalem) Subbidang Kermalem dipimpin oleh Kepala Subbidang Kerjasama Kelembagaan (Kasubbid Kermalem), yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis di bidang kerjasama informasi antar kelembagaan.

Kedua, Subbidang Penerbitan (Subbidang Bit)

Subbidang Bit dipimpin oleh Kepala Subbidang Penerbitan (Kasubbid Bit), yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan evaluasi serta bimbingan teknis di bidang penerbitan Kementerian.

Ketiga, Subbidang Informasi (Subbidang Info) Subbidang Info dipimpin oleh Kepala Subbidang Info (Kasubbid Info), yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan evaluasi serta bimbingan teknis di bidang pengolahan informasi pertahanan

4.2.4 Sumber Daya Manusia

Setiap organisasi, salah satu unsur terpenting adalah sumber daya manusia (SDM), karena unsur inilah yang menggerakkan dan mengelola unsur-unsur lain yang terdapat dalam organisasi. Sumber daya manusia yang ada di Kemhan terdiri atas sipil dan TNI. Lemahnya kualitas atau jumlah pegawai yang tidak mencukupi atau bahkan berlebihan bisa mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.

Untuk mengetahui komposisi pegawai Puskom Publik bisa dilihat dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 4.1

Komposisi Formasi Daftar Susunan Personel (DSP)

Bulan Maret 2014 Puskom Publik Kemhan

No.	Bagian/Bidang	DSP	Kebutuhan	Lebih	Kurang	Nyata
1.	Pusat Komunikasi Publik	14	10	0	10	4
2.	Bagian Tata Usaha	3	1	0	1	2

3.	Subbag Program dan Laporan	5	1	0	1	4
4.	Subbag Dok. dan Perpus	4	2	0	2	2
5.	Subbag Umum	27	2	0	2	25
6.	Bid. Pemberitaan	3	1	0	1	2
7.	Subbid Peliputan dan Publikasi	8	3	0	3	5
8.	Subbid Produksi	14	5	0	5	9
9.	Subbid Hubmedmas	5	1	0	1	4
10.	Bid. Opini	3	1	0	1	2
11.	Subbid Penyiapan Opini	3	0	0	0	3
12.	Subbid Pembentukan Opini	3	1	0	1	2
13.	Subbid <i>Cyber Media</i>	4	1	0	1	3
14.	Bid. Kermainfo	3	1	0	1	2
15.	Subbid Kerjasama Kelembagaan	3	1	0	1	2
16.	Subbid Penerbitan	3	0	0	0	3
17.	Subbid Informasi	4	1	0	1	3
	Jumlah Seluruhnya	109	32	0	32	77

Sumber : Data Puskompublik, Maret 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa formasi yang terisi di Puskom publik kurang lebih tujuh puluh persen. Jadi Puskom Publik masih kekurangan pegawai sekitar tiga puluh persen. Dari 14 formasi yang ada di pusat komunikasi public hanya terisi 4 orang pegawai. Bidang lain yang cukup banyak kekurangan pegawai adalah bidang pemberitaan khususnya subbid produksi. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja terutama penyediaan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

Selain dari jumlah personel yang ada, sebagaimana sudah dibahas pada latar belakang, tingkat pendidikan dan kompetensi juga merupakan faktor yang menunjang kinerja sebuah lembaga. Dalam tabel berikut, sebagian besar pegawai Puskom Publik memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah atas, terutama pada pegawai di tingkat pelaksana

seperti cameramen dan potografer. Pegawai pada tingkat penerimaan SMA ini, sebagian ada yang melanjutkan sekolah ke jenjang sarjana secara mandiri agar dapat bersaing sesuai kompetensi yang dimiliki bersama-sama dengan pegawai yang berasal dari sarjana. Pegawai dengan jenjang yang lebih tinggi rata-rata memiliki posisi atau jabatan di Puskom Publik Kemhan sesuai dengan kotak jabatan yang ada.

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Puskom Publik Kemhan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	2
2.	SMP	2
3.	SMA	51
4.	S1	39
5.	S2	14
6.	S3	1
Jumlah seluruhnya		109

Sumber : Data Puskompublik, Maret 2014

Kekurangan personel yang jumlahnya cukup signifikan serta tingkat pendidikan yang masih pada taraf menengah ini diduga menjadi salah satu faktor penyebab peran Puskom Publik dalam meningkatkan citra Kemhan kurang maksimal.

4.2.5 Sarana dan Prasarana

Sebagai salah satu lembaga pemerintahan di tingkat pusat, Kemhan memiliki sarana dan prasarana pendukung yang mencukupi. Dalam hal ini, Puskompublik sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun informasi dan menyebarkannya kepada khalayak sudah cukup ditunjang oleh peralatan komunikasi yang cukup modern.

Menurut data inventaris yang ada (Lampiran, Data Inventaris Puskompublik), sarana dan prasarana Puskom Publik rata-rata dalam keadaan baik. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Puskom Publik memiliki peralatan peliputan yang cukup memadai, perangkat pengelolaan sistem informasi media di bidang pertahanan, serta sarana penunjang lainnya.

4.2.6 Landasan Hukum

Puskom Publik didirikan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2000, selain menegaskan struktur organisasi Departemen Pertahanan, juga mengatur tentang tugas pokok Departemen Pertahanan. Dalam rangka mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada, maka Departemen Pertahanan melakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2000, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor Per/01/M/VIII/2005, tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan yang baru. Pada perkembangan selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 16 Undang - Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sehingga berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 Departemen Pertahanan diganti menjadi Kementerian Pertahanan. Yang untuk selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Pertahanan nomor 16 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut adalah pembahasan hasil penelitian tentang peran Puskom Publik dalam meningkatkan citra Kementerian Pertahanan. Selain itu

dibahas juga tentang faktor pendukung dan penghambat baik yang bersifat internal dan eksternal.

4.3.1 Peran Pusat Komunikasi Publik dalam Meningkatkan Citra Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data hasil wawancara dari para informan. Data hasil wawancara yang diperoleh mencakup beberapa dimensi yaitu pelaksanaan tugas administratif, memberikan nasihat kebijakan, tugas artikulasi dan agregasi kepentingan, serta tugas menjaga stabilitas politik. Dalam subbab ini akan disajikan juga data tentang faktor-faktor yang menghambat maupun faktor pendukung dalam peningkatan citra Kemhan oleh Puskom Publik

4.3.1.1 Tugas Administratif

Tugas pokok birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan negara adalah untuk mengimplementasikan atau melaksanakan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Ini artinya birokrasi memiliki tugas untuk melakukan fungsi administratif untuk mengelola segala urusan pemerintahan. Hal ini yang menyebabkan birokrasi sering disebut public administration, sementara kalangan eksekutif dan kabinet disebut sebagai government.

Puskom Publik didirikan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2000, selain menegaskan struktur organisasi Departemen Pertahanan, juga mengatur tentang tugas pokok Departemen Pertahanan. Dalam rangka mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada, maka Departemen Pertahanan melakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 19 tahun 2000, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor Per/01/M/VIII/2005, tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan yang baru. Pada perkembangannya selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 16 Undang - Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan dalam rangka kelancaran

penyelenggaraan pemeritahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sehingga berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 Departemen Pertahanan diganti menjadi Kementerian Pertahanan. Yang untuk selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Pertahanan nomor 16 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

Sebagai bagian dari Kementerian Pertahanan, perwujudan tugas administratif Puskompublik sesuai tugas pokok dan fungsinya bisa dilihat dari beberapa program dan kebijakan yang ada. Tugas administratif tersebut adalah perumusan dan pelaksanaan teknis bidang informasi pertahanan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur; pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis; pelaksanaan bimbingan; supervisi teknis dan perizinan di bidang pemberitaan, opini, dan kerja sama informasi pertahanan. Selain itu Puskompublik juga melakukan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, pembinaan kepegawaian, data, dan informasi, dokumentasi, kepustakaan, ketatalaksanaan, dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan pusat.

Sejauh ini pelaksanaan program atau kebijakan sudah berjalan walaupun belum maksimal. Hal ini diungkapkan informan¹ bahwa “program sudah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, namun belum maksimal”. Hal senada juga diungkapkan oleh informan² yang mengatakan bahwa pelaksanaan program atau kebijakan yang berjalan juga sudah disesuaikan dengan aturan dan hukum yang ada.

Berkaitan dengan program dan kebijakan, sangat penting bagi SDM Puskompublik untuk memahami bagaimana standar pembuatan kebijakan karena menyangkut kepentingan yang berskala besar. Informan³ mengatakan sebagian besar SDM Puskompublik telah mengerti tentang standar pembuatan kebijakan public di Kemhan. Informan⁸ menambahkan sedikit bahwa “personel Puskompublik sudah mengerti tentang standar

kebijakan yang harus dilakukan, namun perlu peningkatan kemampuan sehingga mempunyai kemampuan rata-rata yang mendukung tugas Puskompublik.

Mampu tidaknya SDM Puskompublik dalam memahami standar pembuatan kebijakan dari proses perumusan hingga evaluasi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendidikan dan pengalaman. Sebagaimana dikatakan informan3 sebagai berikut :

Latar belakang pendidikan maupun pengalaman SDM Puskom Publik Kemhan sudah pasti turut menentukan bagaimana kebijakan tersebut diambil. Sebagai contoh dalam membuat Permenhan yang berkaitan dengan informasi pertahanan sdh pasti melibatkan unsur SDM Puskom Publik sendiri. Disamping itu KP Publik sebagai juru bicara kementerian pertahanan apabila akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kementerian pertahanan maupun keberhasilan kementerian pertahanan senantiasa melalui proses telaah staf maupun analisis untuk memberikan masukan.

Berkenaan dengan latar belakang pendidikan, Informan2 mengatakan sesuai hasil wawancara tanggal 7 Juli 2014, bahwa "SDM masih perlu peningkatan sesuai tugas yang diemban. Informan1 juga menjelaskan secara rinci kondisi SDM Puskompublik berikut ini.

...dari 100 anggota hanya, 7 orang yang sarjana komunikasi, itu sangat-sangat kurang, ketika kita berikan pelatihan-pelatihan... seperti kemaren itu yang bergabung dengan stasiun televisi, impact nya sama sekali tidak ada, jadi rupanya mentalitas pegawai kita harus dirubah, karena mentalitas pegawainya itu membuat mereka sulit berkembang. Mereka dapat ilmu tapi tidak pernah dipakai, tidak kreatif, jadi tidak berkembang. Hanya beberapa saja yang mau belajar walaupun tidak sesuai dengan ilmu komunikasi, tapi mereka mau belajar, yang lain masih kurang. Sehingga saya mencari sarjana-sarjana ilmu komunikasi yang tidak ditempatkan di Puskompublik, akhirnya dapat dua orang sarjana komunikasi, yang satu dari biro umum, dan satunya lagi dari strategi pertahanan. Saya sampai mengatakan, tidak boleh ada sarjana komunikasi yang bekerja di luar Puskompublik. Tapi masih belum, masih kurang, itu yang pertama tentang masalah sumber daya, Kemudian yang kedua, karena kita bekerja diantara informasi-informasi yang terbuka dan informasi-informasi yang dikecualikan, kita kekurangan sumber daya yang menguasai intelijen, saat ini di Puskompublik, hanya saya saja

yang mempunyai kualifikasi intelijen, eh, dua satu lagi baru dapat seorang letkol. Saya minta dari Bais (Badan intelijen strategis). Mestinya ada, dan saya menginginkan sumber daya intelijen ditambah, karena tugas-tugas itu, sehingga kita dapat bekerja, bagaimana membuat sebuah informasi yang terbuka tapi bisa dipahami berbeda oleh orang lain sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan mereka. Kemampuan menulis juga masih kurang.

Kekurangan faktor SDM ini perlu mendapatkan perhatian besar karena sebagai lembaga yang banyak mengolah informasi pertahanan cukup banyak dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan Kemhan. Hal ini sesuai dengan pendapat informan3 dalam wawancara mendalam yang dilaksanakan tanggal 7 Juli 2014, sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan kebijakan Kemhan, Puskom Publik senantiasa dilibatkan, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan penyampain informasi ke media massa, informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kementerian pertahanan melalui puskom publik untuk sebelum sampai ke media massa.

Selain faktor SDM, hal lain yang perlu dikhawatirkan adalah tentang otonomi Puskom publik sebagai penyampai informasi Kemhan kepada masyarakat. Menurut informan1 dalam wawancara tanggal 30 Juni 2014, sebagai berikut :

“untuk informasi yang keluar yang harus disampaikan kepada masyarakat, tidak ada otonomi, artinya apa yang menjadi kebijakan kemhan, itu yang harus dilaksanakan dan disampaikan kepada seluruh masyarakat, namun bisa menyarankan kepada pimpinan atas layak atau tidaknya suatu informasi tsb harus disampaikan”.
Bicara tentang cakupan otonomi, informan2 mengatakan bahwa “Puskom publik memiliki Otonomi ke dalam, yang menyangkut fungsi teknis dan tugas Puskom publik, namun untuk keluar satu pintu yaitu dari Menteri dan Kapuskom publik sebagai juru bicara”. Hampir sama dengan pendapat sebelumnya, informan3 menjelaskan sebagai berikut :

Puskom publik memiliki otonomi untuk menentukan apakah informasi mengenai kementerian pertahanan layak atau tidak layak disampaikan ke media massa. Karena ada informasi yang penting disampaikan kepada masyarakat dan ada juga informasi yang tidak harus disampaikan kepada masyarakat. Seberapa penting informasi tersebut tentunya Puskom Publik

yang berwenang untuk menetapkannya dengan pertimbangan-pertimbangan.

Untuk tahun 2013 ada tiga buah kebijakan di antaranya permenhan tentang standar biaya perolehan salinan informasi di lingkungan Kemhan, Permenhan tentang daftar informasi di lingkungan kementerian pertahanan, Permenhan tentang tata cara penyebarluasan informasi pertahanan di lingkungan kementerian pertahanan. Sedangkan untuk tahun 2014 Permenhan yang terbit antara lain Permenhan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian pertahanan dan pedoman pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan Kemhan.

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa Puskom Publik sudah melaksanakan tugas administrative dengan baik. Pelaksanaan fungsi ini sesuai dengan Permenhan No. 16 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pertahanan. Hal ini bisa terlihat dari pelaksanaan program dan kebijakan yang sudah mengikuti aturan yang ada. Sebagian besar pegawai juga sudah memahami bagaimana standar pembuatan kebijakan yang ada.

4.3.1.2 Memberi Nasehat Kebijakan

Birokasi sebagai organisasi sentral dalam negara juga memiliki fungsi dalam penyediaan informasi dan nasihat atau saran-saran bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. Tugas ini membedakan peran antar top-level birokrat yang setiap hari melakukan kontak hubungan dengan para politisi dan bertindak sebagai policy adviser, dengan para *middle-level* dan *street level* birokrat yang lebih banyak melaksanakan tugas-tugas rutin administrasi.

Beberapa hal yang berhubungan dengan pemberian nasehat kebijakan di Puskompublik adalah mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi penyediaan dan penyampaian informasi, nasihat dan saran. Melalui proses tersebut diperoleh beberapa opsi yang akan ditawarkan kepada Kemhan sebagai masukan untuk pembuatan kebijakan. Mekanisme

pelaksanaan fungsi penyediaan informasi menurut Informan3 dilaksanakan oleh bagian pemberitaan yang disampaikan kepada Kapuskompublik, penyampaian saran dan tanggapan kepada pimpinan disiapkan oleh bidang opini yang disampaikan oleh Kapuskompublik kepada pimpinan kemhan. Lebih jauh lagi, Informan9 mengatakan bahwa mekanisme penyediaan ini dilaksanakan secara “Berjenjang”. Artinya, penyediaan informasi, nasihat dan saran melalui staf yang bekerja dalam satu “kelompok kerja” yang kemudian disampaikan ke pimpinan Puskompublik, untuk kemudian diteruskan kepada Pimpinan Kemhan RI.

Informasi yang telah diterima oleh Puskompublik kemudian dianalisis dan dijadikan opsi-opsi kebijakan. Informan3 berpendapat bahwa opsi-opsi kebijakan puskom publik terhadap Kemhan dibuat dalam bentuk penyusunan Permenhan yang berkaitan dengan informasi pertahanan. Permenhan ini juga menjadi salah satu contoh konkrit pilihan kebijakan yang sudah diberikan oleh puskom publik pada lembaga misalnya Permenhan tentang tata cara penyebar luasan informasi pertahanan di lingkungan kementerian pertahanan.

Setiap kebijakan yang dihasilkan pasti akan memberikan dampak dan konsekuensi. Dampak dan konsekuensi yang timbul dari ditetapkannya sebuah kebijakan adalah semakin tertibnya pelaksanaan pengelolaan informasi yang ada dalam Puskompublik, misalnya setiap informasi terkait pertahanan yang akan disebarluaskan harus menggunakan nara sumber dari Kemhan sehingga informasi yang beredar tidak menyimpang. Alur informasi menjadi lebih tertib dan mudah dalam pengawasannya.

Secara umum, Puskom Publik sudah melaksanakan fungsi memberikan nasihat kebijakan. Puskom publik sebagai lembaga yang menghimpun informasi kemudian disampaikan dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Harapannya adalah agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4.3.1.3 Tugas Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Meskipun secara formal birokrasi tidak memiliki tugas untuk melakukan artikulasi (menyampaikan) dan agregasi (mengumpulkan/mengelompokkan) kepentingan rakyat, tetapi secara faktual, birokrasi juga sering terlibat dalam fungsi-fungsi ini. Secara regular, karena tugasnya melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, birokrasi harus berhubungan dengan berbagai kelompok masyarakat (stakeholders) yang terkait dengan tugas mereka, seperti guru, dokter, pengusaha, pedagang kaki lima, dan petani. Dampaknya adalah birokrasi, mau tidak mau, harus bisa mendengarkan dan memperhatikan suara dan kepentingan kelompok-kelompok itu, yang secara tidak langsung menjadi klien (*client group*) dari birokrasi. Hal ini penting, supaya, di satu sisi, program dan kebijakan yang dijalankan oleh birokrasi dapat diterima oleh mereka, di sisi lain, *client group* itu juga diharapkan bersedia untuk melakukan partisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas birokrasi, serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggungjawab institusi birokrasi

Puskompublik sebagai bagian dari Kemhan yang mengelola tentang informasi dan pemberitaan tentang pertahanan banyak membina hubungan dengan pihak lain yaitu masyarakat. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan1 bahwa “Hubungan Puskompublik dengan masyarakat berkaitan dengan penyampaian informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat”. Hal senada juga diungkapkan oleh informan3.

Selain masyarakat, Puskompublik juga memiliki keamatan hubungan dengan pihak media massa. Sebagaimana diungkapkan oleh informan2, “Kita merupakan bagian dari publikasi tentang informasi pertahanan, sehingga akan bersentuhan langsung dengan publik dengan perantaranya media”. Hal ini juga senada dengan beberapa pendapat dari beberapa awak media yang diambil sebagai informan.

Hubungan yang terjalin antara Puskompublik dengan masyarakat bisa terjadi secara internal maupun eksternal. Sesuai dengan pendapat informan9 sebagai berikut :

Bahwa sebagai lembaga hubungan masyarakat, Puskompublik tidak terlepas dari hubungan kepada masyarakat baik publik internal maupun publik eksternal. Dalam kaitan ini, Humas mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka menjembatani kepentingan-kepentingan informasi, baik publik internal maupun eksternal dalam rangka untuk meningkatkan citra positif terhadap sebuah lembaga. Tentu saja dalam hal ini adalah Kemhan RI, sehingga image positif dapat tercipta dan masyarakat bisa mendukung program-program yang terkait dengan pertahanan.

Informan1 mengatakan bahwa “pola hubungan yang bersinergi tripartite antara Puskompublik sebagai pengelola informasi pertahanan, media masa sebagai perantara dan masyarakat sebagai penerima informasi”. Puskom Publik membutuhkan media massa baik cetak maupun elektronik. Media massa sebagai saluran yang digunakan oleh puskom publik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat

Dalam membangun hubungan dengan awak media, Humas berusaha memberikan informasi dengan jelas dan transparan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberitaan. Disini tentunya membutuhkan kerjasama yang sangat kuat, dan tentunya melibatkan hubungan emosional bagi humas dan awak media. Apalagi bila mengingat bidang pertahanan negara cukup asing bagi masyarakat awam, sehingga penyampaian informasi berantai ini harus jelas sehingga tidak akan terjadi persepsi yang salah di masyarakat.

Sedikit berbeda, informan6 mengatakan dalam wawancara yang dilaksanakan tanggal 10 Juli 2014, sebagai berikut :

Menurut saya, hubungan harus lebih ditingkatkan dari yang seperti sekarang, masalahnya apakah bisa mengolah isu-isu dan media tertarik mau datang dan menyampaikan ke publik, menurut saya bisa, masalah nya mau apa tidak merubah bahasa rigid itu menjadi bahasa yang dapat diterima dan dimengerti publik, dengan bahasa

media dan yang kedua bagaimana mengemas isu-isu itu menjadi menarik.

Beberapa awak media massa menganggap bahwa walaupun hubungan baik itu sudah terbina, namun tetap saja ada *gap* antara lembaga dan media massa. Hal ini diungkapkan oleh informan⁷ sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan tanggal 17 Juli 2014, berikut ini.

Hubungan itu ada, dan kedepan harus ditingkatkan, namun Bagaimanapun juga menurut saya tetap ada semacam *Gap* antara wartawan yang sipil dengan pejabatnya yang militer, ini yang pertama, yang kedua *gap* personal, karena tiap orang atau tiap pejabat punya karakter masing-masing, jadi pendekatan personal juga sangat penting, dan tiap pejabat berbeda, kemudian yang ketiga terkait kematangan profesional seseorang, baik dari sisi wartawannya, maupun pejabat humasnya. Jadi sebaiknya pejabatnya yang harus lebih mau turun ke bawah, menyatu dengan wartawan, agar tidak ada *gap* diantara wartawan dan pejabat humas, dan perlu waktu untuk merubah pola yang berbeda dengan tugas di kemiliteran dengan wartawan yang berbeda gayanya, sehingga cair dan mempermudah kedua pihak melaksanakan tugas.

Membangun hubungan dengan wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan lembaga Humas dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menilai efektifitas suatu pekerjaan. Keberhasilan tersebut bisa dilihat dari sejauh mana publisitas tersebut melalui pemberitaan wartawan dapat menguntungkan atau meningkatkan citra organisasi di mata publik atau masyarakat sebagai hasil kerjasama yang baik antara pihak Humas dengan wartawan. Selain dengan pihak media, Puskompublik juga membina hubungan kerja sama dengan beberapa lembaga pemerintah dan swasta lainnya. Informan¹ menjelaskan sebagai berikut :

Kita mempunyai satu bidang yang disebut bidang kerja sama informasi, bidang ini yang bertugas untuk berkoordinasi dengan badan-badan humas lainnya, baik humas pemerintah maupun swasta, dan hal itu diwadahi dalam forum bakohumas (badan koordinasi humas) yang rutin dilaksanakan setiap tahun di masing-masing kementerian.

Selama ini Bakohumas sudah menjadi wadah bagi tiap lembaga untuk membangun kemitraan dengan lembaga lain. Puskompublik dengan lembaga pemerintah lainnya adalah sebagai mitra. Puskompublik harus mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi yang dapat diakses oleh lembaga lain yang membutuhkan informasi bidang pertahanan kecuali yang sifatnya rahasia.

Bersentuhan dengan pihak luar membawa konsekuensi tersendiri bagi Puskompublik yaitu harus terbuka terhadap kritik maupun saran. Media sarana penyampaian kritik maupun saran bisa melalui surat ke kotak pos 2005, Web Puskompublik/*Defense media center* (DMC) ataupun lewat sosial media. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh informan1 berikut ini.

“Sebagai lembaga kehumasan instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentu Puskom menerima masukan dan saran serta kritik, dan itu sudah disiapkan sarannya, baik berupa komunikasi tertulis melalui surat atau dengan sosial media yang setiap saat bisa diakses termasuk memberikan komentarnya”.

Pendapat senada juga dijelaskan oleh informan2 dan informan3 sebagai staf bidang opini Puskompublik sesuai hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2014. Adapun pendapat dari awak media tidak jauh berbeda. Mereka mengakui bahwa Puskompublik sangat terbuka terhadap kritik dan saran.

Pihak-pihak yang sering memberikan masukan terdiri dari semua kalangan, baik masyarakat, pengguna sosial media, pengunjung website maupun lembaga humas organisasi lain didalam wadah Bakohumas. Wartawan juga banyak berperan dalam memberikan kritik dan saran pada Puskompublik, karena hubungan kerja keduanya sangat berkaitan satu sama lain. Awak media pasti akan memberikan masukan dan saran kepada puskompublik dalam pengelolaan informasi pertahanan, baik secara langsung maupun melalui sarana media social.

Masukan dan kritik yang diterima harus ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh Puskom publik karena itu merupakan point yang sangat berharga untuk kemajuan Puskom publik maupun pelaksanaan tugas-tugas Kemhan. Masukan diteliti, dianalisa dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Puskom dalam pengelolaan informasi pertahanan, selanjutnya ditindaklanjuti, baik kepada internal Puskom publik maupun kepada Kemhan secara umum.

Dari paparan di atas terlihat bahwa Puskom publik sudah melaksanakan tugas artikulasi dan agregasi kepentingan. Pelaksanaan fungsi ini melibatkan peran media massa sebagai penghubung antara Kemhan dan masyarakat. Beberapa awak media pun mengakui keterlibatan mereka dalam proses penyampaian kebijakan Kemhan kepada masyarakat. Antara media massa dan Kemhan dalam hal ini diwakili oleh Puskom Publik memiliki hubungan yang baik.

4.3.1.4 Tugas Menjaga Stabilitas Politik

Sebagai institusi penyelenggara negara, birokrasi memiliki tugas yang berkaitan dengan penciptaan stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Penguasa, presiden, menteri, konstitusi, undang-undang, partai politik, dan model pemerintahan setiap saat boleh berganti berjuta kali, tetapi birokrasi berkewajiban untuk menjaga agar negara tetap eksis, terintegrasi, dan mekanisme negara yang di dalamnya tetap berjalan secara baik dari waktu ke waktu.

Birokrasi berkewajiban menjaga negara agar tidak mengalami disintegrasi dan mengalami kevakuman pemerintahan. Dalam konteks inilah, di banyak negara modern, birokrasi dibentuk sebagai sebuah badan yang berdasar pada prinsip-prinsip imparsialitas (*impartiality*), memiliki netralitas politik (*political neutrality*), kepermanenan (*permanence*), dan anonimitas (*anonymity*).

Kemhan sebagai representasi pemerintah dibidang pertahanan terlibat dalam urusan politik negara, sehingga mau tidak mau tentu turut serta dalam menciptakan stabilitas sistem politik di Indonesia. Usaha

puskumpublik dalam menciptakan stabilitas politik tersebut dapat dilihat dari sosialisasi program-program pemerintah yang dilakukan puskom khususnya di bidang pengelolaan informasi pertahanan

Puskumpublik dapat dikatakan memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan1 sebagai berikut :

Pasti ada, karena Puskom publik kan mengemban tugas pengelolaan informasi pertahanan, dan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang termasuk melaksanakan pembangunan kekuatan pertahanan, dengan terbangunnya kekuatan pertahanan dapat menjadi salah satu factor terciptanya stabilitas politik di Indonesia, termasuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang netralitas TNI.

Puskumpublik menjaga stabilitas politik sesuai dengan fungsinya. Dikaitkan dengan kondisi saat ini di mana tahun ini Indonesia menggelar pesta demokrasi yang sangat rawan konflik. Hal ini dikuatkan dengan pendapat informan3 dalam wawancara tanggal 7 juli 2014 sebagai berikut.

Puskom Publik senantiasa menjaga stabilitas sistem politik di Indonesia, khususnya dalam menghadapi pesta demokrasi saat ini, puskom pulik sebagai corong dari kementerian pertahanan menginformasikan dan memberitakan netralitas TNI, hal ini penting untuk menghindari adanya pihak-pihak yang ingin menarik TNI untuk memihak salah satu partai atau capres dan cawapres.

Penciptaan stabilitas sistem politik Indonesia melalui pemberian informasi yang benar dan akurat, khususnya tentang situasi maupun kondisi yang berhubungan dengan bidang pertahanan Negara harus dilakukan secara berkesinambungan. Perlu dilakukan beberapa upaya untuk menjaga kesinambungan ini. Berikut pendapat dari beberapa informan.

Informan3 mengatakan, “usaha yang harus dilakukan berkaitan dengan hal ini, antara lain terus menerus menginformasikan tentang sikap netralitas TNI baik melalui media cetak, online maupun elektronik. Informan4 juga menambahkan bahwa “...dan sekiranya hal ini bisa ditingkatkan dengan mengadakan suatu orientasi wartawan mengenai system politik dan pertahanan Negara”. Sedangkan menurut informan5,

“salah satu usaha adalah memanfaatkan wadah Bakohumas sebagai sarana formal untuk bertukar informasi serta apa pesan masyarakat terhadap Kemhan, dan memanfaatkan jaringan non-formal”.

Dalam rangka penyampaian informasi pertahanan yang akurat dan berimbang kepada masyarakat, diperlukan juga sikap netral seluruh staf puskompublik khususnya dan Kemhan umumnya. Hal ini diperlukan untuk menjaga obyektivitas dari sebuah pemberitaan. Netralitas pegawai puskompublik untuk TNI merujuk pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Dengan pengertian dari netralitas TNI sebagai berikut : “Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak. Sedangkan bagi PNS merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyebutkan antara lain, bahwa PNS dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan pemilu dan lain-lain. Netralitas pegawai Puskompublik Kemhan sudah terlihat baik. Hal ini seperti dijelaskan oleh informan3 sebagai berikut :

“Netralitas politik pegawai di Puskom Publik saat ini sudah terlihat baik. Memang ada SDM yang terlihat mengidolakan capres atau cawapres tertentu, namun tidak dituangkan dalam bentuk kampanye atau ajakan yang sifatnya mempengaruhi atau mengarahkan pada pilihan tertentu”.

Personel di Puskom publik sebagian besar terdiri dari PNS. Seperti halnya TNI, mereka bekerja secara profesional tanpa terlibat dalam politik praktis walaupun menggunakan haknya dalam memilih

Menurut informan1, “banyak faktor yang turut mempengaruhi netralitas dalam melaksanakan kegiatan politik, antara lain, kesamaan visi, misi, dan program yang ditawarkan... Informan2 menambahkan juga bahwa faktor yang mengikat netralitas tentu saja aturan yang mengikat PNS.

Prinsip dalam menjaga stabilitas selanjutnya adalah fleksibilitas. Fleksibilitas harus dilaksanakan oleh puskompublik sebagai lembaga humas, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam

pemilihan media, Puskompublik tidak menggunakan pemilihan berdasarkan jenis media tapi menggunakan spectrum berdasarkan apa tujuan komunikasi melalui media, sehingga nanti media yang paling luas cakupannya, media yang paling berpengaruh langsung kepada pikiran orang, media yang paling lama pengaruhnya pada pikiran orang.dengan media yang paling sedikit pengaruhnya (Informan1, wawancara, 30 Juni 2014).

Selama ini belum pernah terjadi masalah terutama yang berkaitan dengan fleksibilitas Puskompublik dalam menyampaikan pemberitaan. Ini ditegaskan oleh informan5, salah seorang awak media yang mengatakan sebagai berikut :

Permasalahan mendasar tidak ada , hanya kita perlu mengetahui tugas dan fungsi masing-masing, sebagai contoh, Kita tahu bahwa di kemhan ada isu-isu atau informasi yang tidak bisa dibuka ke publik, jadi itu berada pada informasi yang dikecualikan seperti informasi-informasi intelijen, tapi dulu kan yang kita sudah anggap rahasia seperti Alutsista, sekarang sudah mulai di share ke masyarakat, yang akhirnya masyarakat menjadi tahu bahwa Alutsista kita sekarang sudah pada tua-tua, terus bagaimana kondisi prajurit kita di perbatasan, ternyata mereka lebih menderita dari pada kita yang tinggal di perkotaan. Jadi menurut saya, khususnya 5 atau 6 tahun terakhir sudah mulai terbuka dan sudah banyak informasi-informasi yang di *share*.

Informan8 juga menambahkan bahwa :

Permasalahan sebenarnya tidak ada, Saya sih, karena sudah punya hubungan baik, saya melihat profesional nya sudah ada, sentuhan personalnya sudah ada, bukan hubungan kelembagaan, rekan-rekan di Puskom semuanya enak di ajak ngomong, jdi dari sisi sentuhan personal nya sudah ada dan dari sisi membangun hubungan personalnya juga sudah ada. Hal-hal seperti inilah sebetulnya yang harus dibangun.

Dari beberapa pendapat tersebut, bisa diketahui bahwa memang tidak ada masalah krusial dalam pelaksanaan prinsip fleksibilitas dalam rangka menjaga stabilitas politik. Hal ini juga didukung oleh semakin dewasanya masyarakat Indonesia dalam menanggapi isu-isu nasional.

Prinsip berikutnya, Puskompublik sebagai lembaga yang mengolah berbagai informasi pertahanan diharuskan mampu untuk menjaga segala

kerahasiaan terutama untuk informasi-informasi yang bukan untuk konsumsi publik atau dikecualikan.

Menurut informan1, sesuai wawancara mendalam yang telah dilaksanakan pada hari senin tanggal 30 Juni 2014, beliau mengatakan bahwa “Ada prosedur yang dilakukan dalam melaksanakan kerahasiaan informasi yaitu informasi yang dikecualikan, dasarnya sesuai Permen no. 40 Tahun 2013 tentang pedoman Komunikasi kehumasan di lingkungan Kemhan dan TNI”.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh informan2 dan informan3 selaku staf bidang opini Pusat komunikasi Publik Kemhan Republik Indonesia.

Penyampaian berita dan informasi yang baik dan berimbang kepada masyarakat berpengaruh terhadap stabilitas politik di Indonesia. Tugas ini sudah dilakukan cukup baik oleh Puskom Publik.

4.3.2 Faktor-Faktor yang Dihadapi oleh Pusat Komunikasi Publik dalam Meningkatkan Citra Kementerian pertahanan Republik Indonesia

Berikut akan dipaparkan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat peran Puskom Publik dalam meningkatkan citra Kemhan. Baik faktor penghambat maupun pendukung ada yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

4.3.2.1 Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor yang dihadapi oleh Puskom Publik dalam meningkatkan citra Kemhan. Faktor-faktor itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mendukung Puskom publik dalam meningkatkan citra Kemhan adalah kualitas SDM. Hal ini dapat dilihat pada jumlah pegawai yang berkualifikasi sarjana 54 orang (table 4.2), dibandingkan dengan jumlah pegawai sebanyak 109 orang, komposisi ini sebenarnya sangat mencukupi. Namun demikian jumlah tersebut belum sesuai dengan kompetensi yang dikehendaki. Informan2 menjelaskan bahwa, “masalah

sumber daya manusia menjadi isu yang krusial untuk mengantisipasi tugas ke depan yang semakin berat dan kompleks”. Bicara mengenai kualitas SDM tidak lepas dari nilai positif dan negatif. Hal positif dari SDM Puskom publik saat ini diungkapkan oleh informan3 sebagai berikut :

Faktor internal yang mendukung tugas Puskom Publik dalam meningkatkan citra Kemhan adalah anggota Puskom Publik yang tergabung dalam tim IBO (*Image Building Operation*). Tim IBO terdiri dari anggota Puskom Publik yang diberi tugas untuk membuat opini positif berupa tulisan atau artikel secara terus menerus yang diupload ke media cetak maupun online serta memberi komentar positif apabila ada berita tentang Kemhan/TNI yang beredar di media massa baik cetak maupun online.

Selanjutnya faktor eksternal yang dapat mendukung Puskom publik dalam meningkatkan citra Kemhan antara lain hubungan baik dengan lembaga humas di luar Kemhan, rekan-rekan media dan jajarannya. Pendapat berbeda dikemukakan oleh informan3 sebagai berikut :

Faktor eksternal dari puskom publik dalam meningkatkan citra Kemhan adalah para penulis eksternal yang direkrut oleh puskom Publik untuk aktif menulis artikel atau berita positif tentang kemhan/TNI baik melalui media cetak maupun online. Disamping para penulis eksternal, faktor eksternal lainnya adalah media massa, media massa sebagai alat maupun saluran dalam menyampaikan pesan sangat penting perannya. Hal ini karena image positif Kemhan yang akan kita bentuk sangat tergantung pada hubungan baik antara Puskom Publik dengan media massa.

4.3.2.2 Faktor Penghambat

Faktor internal yang menghambat (negatif) antara lain diungkapkan oleh informan1 adalah kualitas SDM (Wawancara, 30 Juni 2014), dan informan2 (Wawancara, 7 Juli 2014). Informan3 juga menambahkan faktor yang menghambat selain SDM, sebagai berikut :

Pertama, Faktor internal yang menghambat tugas Puskom Publik dalam meningkatkan citra Kemhan adalah kurangnya SDM Puskom Publik yang mempunyai keahlian menulis, walaupun ada SDM yang memiliki keahlian menulis namun belum ada kemauan untuk menulis.

Kedua, Dari segi sarana dan fasilitas pendukung kerja, Puskom Publik telah cukup menyediakan sarana dan prasarana bagi anggota Puskom Publik untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan citra Kemhan (Wawancara, 7 Juli 2014).

Sementara itu, faktor eksternal yang dianggap menghambat dalam peningkatan citra antara lain adalah kurang intensifnya pembinaan hubungan baik dengan awak media. Hal senada juga diungkapkan oleh Vit dan Tom.

4.3.2.3 Solusi

Hambatan-hambatan tersebut memerlukan solusi yang tidak mudah. Informan1 menuturkan sebagai berikut :

Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan SDM sesuai dengan tuntutan pekerjaan, dengan cara memberikan pelatihan yang sesuai dengan profesinya seperti, cameramen, penulisan artikel yang baik dan melaksanakan reportase yang benar agar memenuhi kompetensi yang diminta”.

Hampir sama dengan pendapat di atas, informan2 juga menambahkan bahwa proses rekrutmen harus dilaksanakan secara benar dan sesuai standar kompetensi. Lebih rinci, informan3 memberikan solusi sebagai berikut :

Pertama, SDM Puskom Publik utamanya yang diberi tugas dalam Tim IBO harus terus diberi pelatihan dalam hal pembuatan tulisan, artikel maupun counter opini.

Kedua, Diberi rangsangan yang seimbang untuk menarik minat DM di Puskom Publik agar banyak membuat tulisan atau artikel guna membangun citra positif Kemhan melalui media massa baik cetak maupun online.

Ketiga, Puskompublik harus terus menerus membina hubungan baik dengan pekerja media, baik itu awak media maupun para Pimpinan Redaksi Media Massa sehingga informasi yang ingin kita sampaikan melalui media dapat tepat sasaran sehingga terbentuk opini positif Kemhan, selain dari pada itu dampak yang kita dapatkan dari hubungan ini maka media massa akan senantiasa membuat berita positif tentang Kemhan/TNI.

Beberapa informan menambahkan perlunya peningkatan kemampuan teknologi informasi personel serta kemampuan bagaimana untuk mengemas pemberitaan lebih menarik.

4.3.3. Relevansi Teori dengan Temuan Penelitian

Pencitraan yang baik akan muncul jika suatu organisasi mampu menjalankan perannya dengan baik. Kemhan sebagai salah satu lembaga birokrat yang menangani urusan pertahanan Negara tidak bisa lepas dari hal ini. Menurut Heywood (dalam Setiyono, 2012:38-43), tugas dan peranan birokrasi dalam suatu Negara mencakup empat fungsi utama, yaitu melaksanakan tugas administratif, memberikan masukan dan nasihat dalam pembuatan kebijakan, melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan, dan menjaga stabilitas politik. Dari beberapa sub organisasi yang ada di dalamnya, Puskom Publik yang memiliki fungsi sebagai *Public Relation* bertugas membentuk pencitraan ini.

Dalam fungsi pelaksanaan tugas administratif, Puskompublik telah melakukan fungsi ini dengan cukup baik walaupun ada beberapa hal yang dianggap belum maksimal. Penyusunan kebijakan mulai dari perumusan hingga evaluasi serta penetapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur membutuhkan SDM yang benar-benar memahami standar pembuatan kebijakan baik dari segi konsep maupun teknis. Namun nampaknya, kompetensi ini belum dimiliki oleh seluruh personel Puskom Publik. Dari latar belakang pendidikan, mayoritas pendidikan pegawai lulusan sekolah menengah atas. Lulusan sarjana yang ada pun tidak seluruhnya memiliki latar belakang keilmuan yang dibutuhkan oleh Puskom Publik seperti yang disampaikan oleh informan1 bahwa hanya 7 orang pegawai yang mempunyai latar belakang sarjana komunikasi.

Upaya mengatasi hal tersebut, Puskompublik sebenarnya sudah memberikan banyak pelatihan, namun kegiatan-kegiatan itu belum memberikan hasil yang positif terhadap kinerja pegawai Puskompublik.

Kendalanya terletak pada mental pegawai yang masih belum tergerak untuk lebih menguasai pekerjaannya dengan baik.

Peran kedua yaitu melaksanakan fungsi pemberian masukan dan nasihat dalam pembuatan kebijakan bidang pertahanan. Sebagai lembaga pemberi informasi bagi Kemhan, puskompublik sudah melaksanakan fungsi dengan cukup baik walaupun realisasinya di lapangan sering berbenturan dengan kepentingan-kepentingan politis beberapa pihak terutama pihak media yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dengan berbagai macam kepentingan yang berbeda.

Berkaitan dengan penyampaian informasi dari puskom kepada pimpinan Kemhan, proses yang berjenjang terkadang memakan waktu yang relative lebih lama. Hal ini jika tidak disikapi dengan seksama akan memberikan kesan lambat dalam memberikan informasi. Sebagai contoh, jika ada pemberitaan yang membutuhkan klarifikasi secepatnya mengenai pertahanan, karena ada proses berjenjang yang mesti ditempuh bukan tidak mungkin akan banyak bermunculan opini-opini di tengah masyarakat yang sudah lebih dulu berkembang yang sumbernya tidak akurat dan puskompublik sudah terlambat untuk *recovery* nya. Namun proses berjenjang ini tidak selamanya bernilai negative. Proses ini sebagai upaya kehati-hatian Kemhan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bagaimanapun juga, tidak semua informasi pertahanan perlu diketahui masyarakat luas. Ada beberapa informasi yang dikecualikan disampaikan kepada publik karena menyangkut stabilitas politik serta pertahanan Negara.

Pelaksanaan tugas artikulasi dan agregasi kepentingan harus mendapatkan perhatian yang cukup dari Puskompublik. Dalam pelaksanaannya, Puskompublik membutuhkan mitra dalam hal ini media massa sebagai perantara penyampaian informasi kepada masyarakat terutama media massa yang berpihak kepada kepentingan informasi pertahanan. Beberapa kendala dalam pelaksanaan peran ini antara lain disebabkan perbedaan kultur organisasi. Kemhan yang sebagian personelnnya berasal dari kalangan militer kental dengan kultur organisasi

yang rigid (kaku). Hal ini terbawa juga dalam gaya penyampaian informasi kepada pihak media massa.

Munculnya gap antara Kemhan dan media massa juga tidak terelakkan. Pertama, kesenjangan antara wartawan sipil dan pejabat yang bernuansa militer. Kedua, kesenjangan yang timbul karena saat ini tidak ada media yang berpihak kepada kepentingan pertahanan, bahkan media RRI dan TVRI yang notabenehnya milik pemerintahpun tidak bisa sepenuhnya mendukung kepentingan penyampaian informasi pertahanan. Kesenjangan yang ketiga berasal dari tingkat profesionalitas baik dari pihak media massa maupun pejabat Kemhan dalam hal ini pejabat humas.

Kesenjangan-kesenjangan tadi perlu disiasati dengan bijaksana oleh Puskompublik. Perbedaan-perbedaan tidak mungkin disatukan. Hal terpenting adalah masing-masing pihak belajar dan berusaha menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Keberhasilan puskompublik dalam membina hubungan baik dengan media akan meningkatkan citra Kemhan di tengah masyarakat terutama membina media massa milik pemerintah seperti RRI dan TVRI yang harus senantiasa mendukung penyampaian informasi tentang pertahanan.

Dalam menjaga stabilitas politik, peran-peran yang telah dibahas sebelumnya di atas jika sudah terlaksana dengan baik akan memiliki andil besar dalam menjaga stabilitas politik. Selama ini peran dalam menjaga stabilitas politik sudah dijalani dengan cukup baik oleh Puskom publik. Netralitas pegawai maupun fleksibilitas lembaga sudah cukup terbangun.

Efektivitas *Public Relation* di dalam pembentukan citra (nyata, cermin dan aneka ragam) organisasi, erat kaitannya dengan kemampuan (tingkat dasar dan lanjut) pemimpin dalam menyelesaikan tugas organisasinya, baik secara individual maupun tim yang dipengaruhi oleh praktek berorganisasi (*job design, reward system*, komunikasi dan pengambilan keputusan) dan manajemen waktu/perubahan dalam mengelola sumber daya (materi, modal dan sumberdaya manusia) untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif, yaitu mencakup penyampaian perintah, informasi,

berita dan laporan, serta menjalin hubungan dengan orang. Hal ini tentunya terkait erat dengan penguasaan identitas diri yang mencakup aspek fisik, personal, kultur, hubungan organisasi dengan pihak pengguna, respons dan mentalitas pengguna (Hubeis, 2001)

Sesuai dengan pendapat Hubeis di atas bahwa pembentukan citra organisasi erat kaitannya dengan kemampuan pemimpin. Secara formal, tugas pencitraan secara spesifik tidak ada dalam peraturan menteri yang mengatur tentang tugas, pokok, dan fungsi Puskom Publik. Namun usaha untuk membentuk citra ini dapat dilihat dari bagaimana Puskom Publik membentuk opini maupun lawan opini. Tugas pencitraan melekat dengan tugas pokok lembaga. Hal ini bisa muncul ketika pimpinan mampu mengarahkan dan mengelola SDM untuk bekerja baik secara individual maupun bekerja sama sehingga menimbulkan citra yang baik di luar maupun di dalam organisasi.

Sebagai lembaga yang mengelola informasi-informasi pertahanan, Puskom Publik juga dituntut untuk mampu melakukan manajemen waktu atau perubahan yang baik terutama dalam mengelola SDM dan waktu. Dinamika sosial yang senantiasa berubah mampu diimbangi oleh kinerja Puskom Publik. Hal ini terlihat dari tampilan-tampilan berita yang selalu *diupdate* di situs Kemhan. Penerapan *reward system* melalui pemberian penghargaan bagi para pegawai yang berprestasi sudah ada meskipun perlu ditingkatkan. Hal ini dianggap positif sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja.

Sebagai organisasi dengan sistem terbuka, Puskom Publik dengan lingkungan luarnya terutama dengan badan-badan yang berpengaruh kepada kehidupan lembaganya sendiri penting untuk mengadakan Komunikasi dengan pihak luar. Ini sudah banyak dilakukan baik itu dengan lembaga yang sejenis seperti lembaga humas pemerintah lainya maupun lembaga-lembaga lain seperti media massa. Media massa membantu Puskom Publik menyampaikan pemberitaan yang berimbang kepada masyarakat luas.

Sebagai contoh kasus, isu tentang Leopard. Banyak pro dan kontra yang terjadi di tengah masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Puskompublik menggunakan milis-milis untuk membentuk opini baru tentang leopard kepada masyarakat luas. Puskompublik juga menyiapkan kurang lebih 200an eksemplar majalah gatra untuk disebar ke perpustakaan-perpustakaan di berbagai universitas dalam rangka mendapatkan dukungan intelektual. Respon yang diperoleh cukup positif. Dengan suguhan berita yang berimbang, masyarakat tentu dapat memberikan penilaian yang baik pula terhadap suatu isu.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Peran Puskompublik dalam meningkatkan citra kementerian pertahanan belum optimal. Padahal Puskompublik memiliki peran penting dalam meningkatkan citra Kemhan, karena Puskompublik bertugas dan bertanggungjawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat selaku penerima informasi. Ketidak optimalan tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu :

5.1.1.1 Kekurangan jumlah pegawai.

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh data dan hasil penelitian, pegawai Puskompublik masih kekurangan 30 persen dari DSP yang ada, dari 109 formasi yang ada, hanya baru terisi 77 pegawai (Tabel 4.1). Kekurangan pegawai tersebut terutama pada pegawai yang mempunyai kompetensi bidang komunikasi (hanya tujuh orang) khususnya pelaksana dibidang reportasi, penulisan dan peliputan. Sumber daya manusia Puskompublik perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, dimulai dari proses perencanaan tentang rekrutmen pegawai yang benar yang saat ini sudah dilaksanakan secara *online* oleh biro kepegawaian Kemhan sesuai aturan kementerian PAN dan RB. Rekrutmen tersebut sesuai dengan komposisi dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan Puskompublik yaitu menambah sarjana komunikasi,

5.1.1.2 Kekurangan Frekuensi pelatihan.

Puskompublik belum intens dalam melaksanakan pelatihan, saat ini kegiatan pelatihan yang terjadwal sesuai program hanya sekali dalam setahun. Hal ini masih dirasakan kurang baik untuk pemeliharaan

kemampuan maupun peningkatan kemampuan sesuai dengan tuntutan tugas dan pekerjaan. Paling tidak, Puskompublik memberikan pelatihan per semester (dua kali dalam setahun) untuk meningkatkan kemampuan pegawai seperti kursus maupun pelatihan reportasi, peliputan dan potografi baik dengan mengadakan pelatihan sendiri di Badiklat Kemhan maupun bekerja sama dengan media massa dan organisasi di luar Kemhan.

5.1.2 Faktor-faktor yang dihadapi oleh Puskompublik dalam meningkatkan citra kementerian pertahanan adalah sebagai berikut:

5.1.2.1 Sinergitas antara lembaga Humas, media massa dan masyarakat belum terbangun.

Kerjasama dengan lembaga Humas di luar kemhan maupun dengan media massa mutlak diperlukan dalam rangka sinergitas antara pemerintah, dalam hal ini kementerian pertahanan, media massa dan masyarakat selaku penerima informasi di bidang pertahanan

5.1.2.2 Pembinaan Media massa belum intensif.

Pembinaan media massa oleh Puskompublik saat ini belum intensif dilakukan. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yaitu penyampaian informasi di bidang pertahanan kepada masyarakat secara benar dan berimbang, minimal pembinaan kepada media massa milik pemerintah seperti RRI dan TVRI agar selalu mendukung kebijakan pertahanan dengan memberikan informasi yang cepat tepat dan akurat.

5.1.2.3 Kekurangan Anggaran.

Anggaran Puskompublik untuk melaksanakan perannya secara maksimal dalam menyelenggarakan dan menyampaikan informasi pertahanan kepada masyarakat belum mencukupi, terutama dalam hal pembinaan hubungan media massa, seperti melaksanakan pertemuan

secara berkala, mengadakan *press tour* ataupun mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan informasi pertahanan.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa simpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran untuk lebih melengkapi penelitian dan pembahasan in baik saran teoretis maupun saran praktis.

5.2.1 Saran Teoretis

Saran Teoretis yang perlu disampaikan adalah bahwa perlu penelitian lanjutan tentang hal-hal sebagai berikut :

5.2.1.1 Analisis media tentang bagaimana pandangan para pemilik media massa terhadap kepentingan penyampaian informasi kepada masyarakat secara benar dan berimbang dihadapkan dengan kepentingan yang berbeda-beda dari para pemilik media massa.

5.2.1.2 Komunikasi publik antara Puskompublik sebagai corong Kemhan dengan media massa sehingga dapat membentuk opini positif masyarakat terhadap isu-isu pertahanan Negara Indonesia.

5.2.2 Saran Praktis

Beberapa saran praktis yang dapat diberikan kepada Puskom Publik adalah sebagai berikut.

5.2.2.1 Melakukan usaha untuk membina hubungan baik dengan media massa terutama media massa milik pemerintah seperti TVRI dan RRI, sehingga informasi yang ingin kita sampaikan melalui media dapat tepat sasaran sehingga terbentuk opini positif Kemhan, selain dari pada itu dampak yang kita dapatkan dari hubungan ini maka media massa akan senantiasa membuat berita positif tentang Kemhan/TNI.

5.2.2.2 Puskom Publik menghidupkan kembali media massa internal seperti Harian Angkatan Bersenjata, jika memungkinkan, perlu membuat saluran televisi sendiri.

5.2.2.3 Dalam beberapa kasus, *hacker* memang menjadi masalah. Tetapi jika diperlukan bisa dilakukan pembinaan khusus kepada mereka. Pembinaan yang tepat akan memberikan manfaat atas kemampuan mereka untuk menjaga keamanan terhadap data-data pertahanan Negara.

5.2.2.4 Adanya usaha-usaha peningkatan SDM yang lebih spesifik untuk mendukung tugas Puskom Publik, seperti kemampuan menulis. Pegawai diberi stimulant/insentif yang seimbang untuk meningkatkan minat menulis agar banyak membuat tulisan atau artikel guna membangun citra positif Kemhan melalui media massa baik cetak maupun online.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, 2002, *Teori dan Profesi Kehumasan Serta aplikasinya di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung : Bumi Aksara
- Ardianto, Elvinaro, dan Soleh Sumirat, 2004, *Dasar-Dasar Public Relations*, Cetakan Ketiga, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____, 2011. *Handbook of Public Relations, Pengantar Komprehensif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- _____. 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Surabaya: Kencana.
- _____. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dominick, Joseph, R. 1999. *The Dynamics of Mass Communication*. Boston: McGraw-Hill College.
- Effendy, Onong Uchjana, 1986, *Dimensi-dimensi Komunikasi*, Bandung, Alumni.
- Farrar, Ronald, T. *Mass Communication: An Introduction to the Field*. St. Paul: West Publishing Company. 1988, 5.
- Heryanto, Gungun, dkk., 2012, *Public Relations Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hifni Alifahmi. 2005. *Sinergi Integrasi Iklan, Komunikasi, Public Relations, Pemasarandan Promosi*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Hubeis, 2001, *Public Relations Sebagai Perangkat Manajemen Dalam Organisasi*, Makalah Seminar Nasional Public Relations Dalam Pembangunan Pertanian Efektif dan Berkesinambungan, yang diselenggarakan oleh PS KMP dan PS MPI. PPS IPB di Hotel Salak, 19 April 2001
- Jefkins, Frank, 2003, *Public Relations*, Alih Bahasa Daniel Yadin, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta.
- Junaedi, Fajar, 2013, *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera.

Lasswell, Harold, D. *The Structure and Function of Communication in Society*”, reprinted in Schramm and Roberts, *Mass Media and National Development*.

Muhammad, Dr. Arni, 2008, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Peterson, Theodore, Jay W. Jensen, William L. Rivers. 1965. *The Mass Media and Modern Society*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Rush, Michael, dkk, 2011, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Setiyono, Budi, 2012, *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Bandung: Penerbit Nuansa.

Soekanto, Soerjono. 1984, *Beberapa Teori tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali.

Subiakto, Henri dan Ida, Rachma, 2012, *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*, Jakarta: Prenada Media.

Tangkilisan, Hessel, Nogi. 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Vardiansyah Dani, 2005, *Filsafat Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Indeks.

Wardhani, Andy Corry Dkk, 2013, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sumber Lain:

Departemen Pertahanan Indonesia. 2007. *Strategi Pertahanan*. Jakarta: Departemen Pertahanan Indonesia.

Departemen Pertahanan Indonesia. 2007. *Doktrin Pertahanan*. Jakarta: Departemen Pertahanan Indonesia.

Departemen Pertahanan Indonesia. 2003. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Departemen Pertahanan Indonesia.

MD. Rahadhini, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 10, No. 1, April 2010 : 11 – 2, Surakarta: FE Universitas Slamet Riyadi.

Lubis, Evawani, Elysa, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012: 1 – 73.

LAMPIRAN “A”**PEDOMAN WAWANCARA****I. Melaksanakan Tugas Administratif**

Indikator

1. Melaksanakan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan
 - a. Dasar hukum apa yang dijadikan landasan pembentukan Puskompublik di Kemhan?
 - b. Bagaimanakah pelaksanaan program atau kebijakan di Puskompublik Kemhan?
 - c. Apakah dalam pelaksanaan program atau kebijakan sudah sesuai dengan aturan dan hukum yang ada?
2. Menentukan bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan secara terperinci.
 - a. Sejauh mana SDM puskompublik mengerti tentang standar pembuatan kebijakan publik di Kemhan? (rincian proses).
 - b. Sejauh mana puskompublik dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan Kemhan?
3. Membentuk atau menawarkan kebijakan.
 - a. Seberapa luas otonomi lembaga (puskompublik) dalam membuat sebuah kebijakan?
 - b. Berapa tinggi frekuensi puskompublik membentuk atau menawarkan kebijakan-kebijakan baru kepada lembaga?
4. Melakukan usaha pencapaian hasil.
 - a. Bagaimana usaha pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh puskompublik?
 - b. Jelaskan bukti konkrit yang telah dihasilkan?
5. Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diperoleh.
 - a. Sejauh mana kewenangan puskompublik dalam mengelola dan menindaklanjuti informasi yang telah diperoleh?

- b. Berapa besar tanggung jawab puskompublik terhadap hasil yang telah diperoleh?
- c. Apakah kewenangan puskompublik seimbang dengan besarnya tanggung jawab?

II. Memberi Nasihat Kebijakan

Indikator

1. Menyediakan informasi dan nasihat atau saran-saran kepada lembaga dalam mengambil suatu kebijakan.
 - a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan fungsi penyediaan informasi, nasihat, dan saran yang ada di puskompublik terhadap kemhan?
 - b. Bagaimana mekanisme penyampaian informasi, nasihat, dan saran terhadap Kemhan?
2. Memberikan berbagai pilihan tentang garis besar sebuah kebijakan (*outlining the policy options*).
 - a. Bagaimana mekanisme puskompublik memberikan berbagai opsi-opsi kebijakan terhadap Kemhan?
 - b. Berikan contoh konkrit pilihan-pilihan kebijakan apa yang sudah diberikan puskompublik pada lembaga?
3. Memberikan pandangan (*reviewing policy proposals*).
 - a. Bagaimana puskompublik memberikan pandangan tentang dampak dan konsekuensi yang mungkin timbul dari ditetapkannya sebuah kebijakan?
 - b. Bagaimana respon lembaga terhadap pandangan-pandangan tersebut?

III. Tugas Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Indikator

1. Membina hubungan baik dengan pihak lain.
 - a. Jelaskan hubungan Puskompublik dengan masyarakat baik secara langsung maupun tidak?

- b. Jelaskan hubungan Puskompublik dengan media massa baik cetak maupun elektronik?
 - c. Jelaskan hubungan Puskompublik dengan lembaga pemerintah lainnya?
2. Memperhatikan suara dan kepentingan pihak lain.
 - a. Apakah Puskompublik menerima masukan berupa saran dan kritik dari pihak lain?
 - b. Pihak-pihak mana saja yang sering atau kadang-kadang memberikan masukan kepada puskompublik?
 - c. Apa tindak lanjut dari puskompublik menanggapi saran dan kritik tersebut?

IV. Tugas Menjaga Stabilitas Politik

Indikator

1. Imparsialitas
 - a. Adakah usaha puskompublik dalam menciptakan stabilitas sistem politik di Indonesia? (sesuaikan dengan tupoksi).
 - b. Adakah usaha puskompublik dalam menciptakan kontinuitas (kesinambungan) sistem politik di Indonesia? (sesuaikan dengan tupoksi).
2. Netralitas politik
 - a. Bagaimanakan netralitas politik pegawai di puskompublik.
 - b. Jelaskan faktor yang mempengaruhi netralitas tersebut?
3. Kepermanenan
 - a. Bagaimana tingkat fleksibilitas puskompublik dalam membina hubungan dengan pihak luar?
 - b. Apakah selama pernah terjadi masalah berkaitan dengan hal tersebut?
4. Anonimitas
 - a. Apakah puskompublik memiliki prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi?

- b. Bagaimana jaminan puskompublik dalam menjaga kerahasiaan informasi yang bisa meresahkan masyarakat?

V. Faktor-faktor yang dihadapi oleh Pusat Komunikasi Publik dalam meningkatkan citra Kementerian pertahanan Republik Indonesia.

1. Faktor Pendukung

- a. Jelaskan faktor internal yang mendukung tugas puskompublik dalam meningkatkan citra Kemhan?
- b. Jelaskan faktor eksternal yang mendukung tugas puskompublik dalam meningkatkan citra Kemhan?

2. Faktor Penghambat

- a. Jelaskan faktor internal yang menghambat tugas puskompublik dalam meningkatkan citra Kemhan?
- b. Jelaskan faktor eksternal yang menghambat tugas puskompublik dalam meningkatkan citra Kemhan?
- c. Jelaskan solusi dari tiap-tiap hambatan?